



LAPORAN TRIWULAN 4



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	4
I. Rencana Kerja ICCTF Tahun 2021	7
II. Progres dan Capaian	11
1. Progres Proyek	12
A. Coremap–CTI World Bank	12
B. Coremap–CTI Asian Development Bank	38
C. Blended Finance	58
D. Blue Carbon	62
2. Program Strategis dan Penggalangan Dana (<i>Fundraising</i>)	68
2.1 Undangan Konferensi SDGs Tujuan 14: Ekosistem Lautan	68
2.2 Undangan Pembahasan Hasil Analisis Data Survei Neraca SDAL Gili Matra	70
2.3 Undangan Kick Off Meeting CPPR Bank Dunia	72
2.4 Undangan Rapat Pembahasan RAN TPB/SDGs 2020-2024	73
2.5 Undangan Kelompok Kerja Peningkatan Regulasi dan Harmonisasi Sistem Pemerintah dan Bank Dunia	75
2.6 Undangan CPPR Meeting Working Group III: Implementasi – Meningkatkan Kinerja Proyek Bank Dunia yang Sedang Berjalan	77
2.7 Undangan Loknas KKHL “Konservasi Efektif untuk Ruang Laut Lestari”	78
2.8 Undangan Pertemuan 3rd ATSEA-2 Regional Steering Committee Meeting	79
2.9 Undangan Rapat Koordinasi Pokja RAN Konservasi Mamalia Laut ke-3	79
2.10 Marine Tourism Meeting	80
2.11 Undangan Penutupan Global Marine Commodities (GMC)	81
3. Komunikasi, Outreach dan Kemitraan	82
3.1 Media Sosial	83
3.2 Produksi Media	91
3.3 Media Monitoring	93
III. Audit, Keuangan dan Operasional	98
1. Laporan Audit Tahun 2021	99
2. Informasi Keuangan Periode Juli-September 2021	99
3. Operasional / Kesekretariatan	100



RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) merupakan Lembaga Wali Amanat Nasional (*National Trust Fund*) dalam bidang penanganan perubahan iklim. Sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, ICCTF mengelola dana APBN dan dana hibah dari mitra pembangunan dengan tujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam menekan emisi gas rumah kaca serta implementasi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Kegiatan yang dilaksanakan ICCTF meliputi pengelolaan proyek, penggalangan dana, komunikasi dan *outreach* serta operasional Satker. Dalam hal pengelolaan proyek, ICCTF membagi proyek-proyek yang dikelola berdasarkan *thematic windows* ke dalam empat fokus area, yaitu i) *Land-based Mitigation*; ii) *Adaptation and Resilience*; iii) *Energy*, dan; iv) *Marine-based*. Sejalan dengan peningkatan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan laut dan sumber dayanya, saat ini ICCTF menitikberatkan fokus pada tema program berbasis kelautan (*Marine-based*) sejak tahun 2020.

Saat ini ICCTF sedang mengimplementasikan proyek hibah

COREMAP – CTI World bank (WB) yang dilaksanakan pada 4 lokasi yaitu TNP Laut Sawu, SAP Waigeo Sebelah Barat, KKPD Raja Ampat, dan SAP Raja Ampat di 2 provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat. Kegiatan utama yang dicapai pada periode ini meliputi pembangunan infrastruktur menara pengawas, pusat informasi ekowisata, pusat monitoring Cetacea dan karamba jaring apung. Progress pembangunan infrastruktur tersebut sebagian besar sudah selesai dan beberapa masih dalam proses pembangunan, serta dalam proses penyerahan kepada *stakeholder* setempat. Pengadaan peralatan penunjang survei dan peralatan penunjang pengawasan. Pada periode ini juga telah dilaksanakan beberapa pelatihan untuk masyarakat dan para *stakeholder* terkait pengelolaan kawasan pesisir, serta telah dilaksanakan meeting group regional COREMAP-CTI WB untuk membahas lebih dalam terkait program COREMAP-CTI WB yang berperan meningkatkan nilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan *Training on Fisheries Management Practices: Application of Bio-Economic Approach to Shrimp Fisheries* ICCTF juga sudah

mengimplementasikan seluruh kegiatan COREMAP – CTI Asian Development Bank (ADB) yang dilaksanakan oleh Konsultan Perusahaan dan LSM. Kegiatan yang sudah dilaksanakan berada di 3 lokasi di KKPD Nusa Penida, Provinsi Bali; TPK Gili Balu, dan TWP Gili Matra, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada periode ini kegiatan yang dicapai adalah survei dan identifikasi ekosistem di lokasi *project*, identifikasi potensi sumber daya perikanan di lokasi *project*, serta pelatihan untuk Pokmaswas. Selain itu telah dilaksanakan penanaman mangrove di Pulau Namu. Progress pembangunan infrastruktur masih dalam proses penyusunan DED. Empat dari tiga mahasiswa *master degree* telah menyelesaikan semester kedua, sementara satu mahasiswa yang baru memulai studinya bulan Juli 2021 telah menyelesaikan semester pertama. Pada periode ini juga dilaksanakan Workshop Research Plan for Master Degree di Lombok untuk berdiskusi dan mengamati langsung proposal penelitian mereka dengan perwakilan dari Universitas, NGO, dan Pemerintah Daerah.

Pada periode ini kegiatan *Blended Finance* melanjutkan konsolidasi dengan World Bank, Asian Development Bank. Selain itu, pada periode ini ICCTF juga bertemu

dengan UNDP dan BNI untuk membahas potensi pendanaan *Blue Finance*

Kegiatan *Blue Carbon* pada periode ini berupa diskusi dengan DISER – Australia. Selain itu, ICCTF mengikuti Side Event COP26 secara daring yang bertempat di Paviliun Australia dengan judul “How Can Blue Carbon Policies be Designed to Drive Sustainable and Effective Change”. Direktur Eksekutif ICCTF, dalam paparannya menjelaskan mengenai Indonesia Blue Carbon Strategy Framework (IBCSF).

Penggalangan dana lainnya juga mulai dilakukan yaitu terkait *Marine Tourism*. Selain itu pembahasan tentang potensi dukungan pendanaan lain masih terus dilanjutkan.

Hasil kegiatan diwartakan dalam website ICCTF dan melalui media sosial ICCTF. Selain itu kerjasama penyebaran informasi kegiatan lapangan juga menggunakan media sosial yang dilakukan bersama-sama dengan Mitra Pelaksana. Perbaikan website ICCTF mulai dilakukan pada masa ini. Selanjutnya tim komunikasi ICCTF melakukan analisis media sosial setiap akhir bulan guna melihat perkembangan sosialisasi program kepada masyarakat umum.

1

RENCANA KERJA ICCTF TAHUN 2021



Q1

JAN – MAR

Pengelolaan Proyek

- Monev dan *spotcheck* Paket Kegiatan COREMAP–CTI WB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI WB
- Pengadaan konsultan COREMAP–CTI ADB
- Pelaksanaan beasiswa *master degree* COREMAP–CTI ADB
- Pelaksanaan *Kick-Off* COREMAP–CTI ADB
- Persiapan studi bioekonomi rumput laut di Lesser Sunda
- Pelaksanaan *workshop* hasil kajian studi bioekonomi perikanan udang di Laut Arafura

Penggalangan Dana

- Persiapan proyek LAUTRA dengan WB
- Persiapan proyek Eco Fishing Port dengan AFD
- Penggalangan Pendanaan Sustainable Aquaculture

Komunikasi

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan *sponsorship*
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan elektronik
- Distribusi kalender ICCTF 2021

Dukungan Operasional

- Entry meeting
- Pengadaan staf ICCTF
- Workshop Koordinasi Kuartal I ICCTF 2021

Q2

APR – JUN

Pengelolaan Proyek

- Monitoring lapangan COREMAP–CTI WB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI WB
- Pengadaan konsultan COREMAP–CTI ADB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI WB
- Persiapan studi bioekonomi Tuna, Kakap Merah dan rumput laut di Lesser Sunda

Penggalangan Dana

- Persiapan proyek LAUTRA dengan WB
- Persiapan proyek Eco Fishing Port dengan AFD
- Penggalangan Pendanaan Sustainable Aquaculture

Komunikasi

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan *sponsorship*
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan elektronik

Dukungan Operasional ICCTF

- Audit BPK
- Pengadaan staf ICCTF
- Workshop Koordinasi Kuartal II ICCTF 2021

Q3

JUL - SEP

Pengelolaan Proyek

- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI WB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI ADB
- Implementasi studi bioekonomi tuna, kakap merah dan rumput laut di Lesser Sunda
- Workshop Evaluasi Proyek Hibah

Penggalangan Dana

- Persiapan proyek LAUTRA dengan WB
- Persiapan proyek Eco Fishing Port dengan AFD
- Penggalangan Pendanaan Sustainable Aquaculture

Komunikasi

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan *sponsorship*
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan elektronik

Dukungan Operasional ICCTF

- Workshop Koordinasi Kuartal III ICCTF 2021

Q4

OCT - DEC

Pengelolaan Proyek

- *Programmatic and Finance Monitoring*
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI WB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI ADB
- Implementasi dan pelaporan studi bioekonomi tuna, kakap merah dan rumput laut di Lesser Sunda
- Workshop Evaluasi Proyek Hibah

Penggalangan Dana

- Persiapan proyek LAUTRA dengan WB
- Persiapan proyek Eco Fishing Port dengan AFD
- Partisipasi dalam UNFCCC – COP 26 2021

Komunikasi

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan *sponsorship*
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan media elektronik
- Produksi Kalender ICCTF 2021

Dukungan Operasional ICCTF

- Workshop Koordinasi Kuartal IV ICCTF 2021

Pada kuartal keempat, secara garis besar ICCTF merencanakan sudah memulai implementasi proyek yaitu Paket Kegiatan COREMAP–CTI ADB dan studi bioekonomi tuna, kakap merah dan rumput laut di Lesser Sunda. Rencana kerja utama COREMAP - CTI World Bank pada periode triwulan keempat 2021 (periode Oktober-Desember 2021) adalah melanjutkan implementasi program enam paket kegiatan yang akan dilakukan oleh Mitra Pelaksana di Raja Ampat dan TNP Laut Sawu yang sudah hampir mencapai akhir project.

Pada periode ini juga akan dilakukan kegiatan kunjungan untuk pemantauan implementasi di lapangan baik dari sisi program maupun keuangan, serta *Workshop* Evaluasi Proyek Hibah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan implementasi kegiatan proyek berjalan secara efektif dan sesuai SOP, demi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan proyek. Selain itu, pada kuartal keempat, ICCTF akan berpartisipasi pada forum internasional UNFCCC – COP 26 di Glasgow, Skotlandia.



2

PROGRES dan
CAPAIAN

1 | PROGRESS PROYEK

A. COREMAP–CTI World Bank



Kegiatan PIU COREMAP - CTI World Bank

a. Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur

Pada tanggal 13-16 Oktober 2021, ICCTF mengikuti kegiatan monev infrastruktur di Raja Ampat terhadap infrastruktur yang dibangun oleh mitra pelaksana paket 1 Yayasan Terangi. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Keramba Jaring Apung (KJA) dan Stasiun Pemantauan Pari Manta di KKPD Selat Dampier, Raja Ampat; serta melakukan diskusi dengan Yayasan Terangi terkait hasil monitoring infrastruktur dan rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan.

Dari hasil monev didapatkan data bahwa sudah ada beberapa kerusakan kecil yang terjadi pada keramba jaring apung dan stasiun pari manta terutama pada bagian yang mudah terkorosi seperti gagang pintu. Hal ini dimungkinkan karena monev baru dilakukan setelah beberapa waktu infrastruktur terbangun. Rekomendasi yang diberikan untuk segera di perbaiki kembali bagian yang rusak dan ditambahkan cat anti karat. Pembiayaan perbaikan berasal dari kontraktor karena masih dalam masa pemeliharaan.

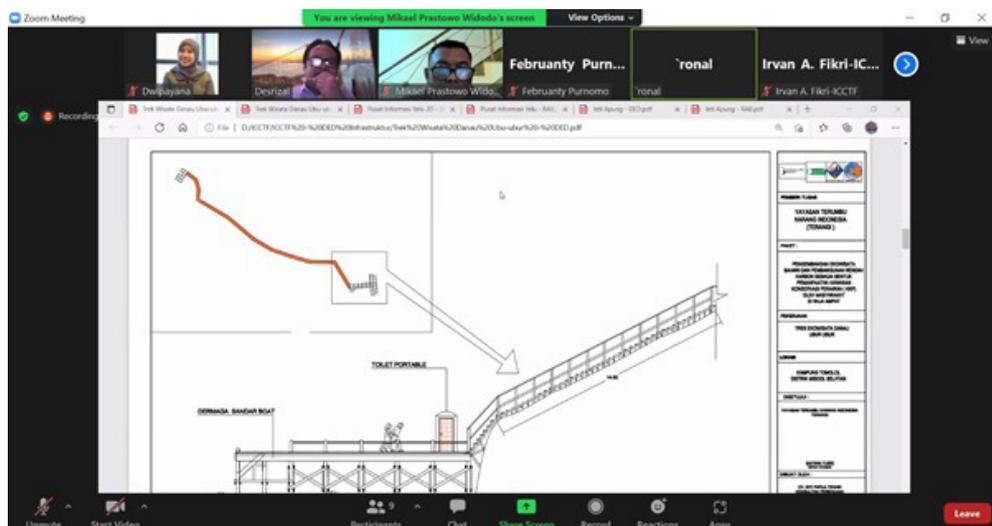


Gambar 1.A.1. KJA Yensawai Barat berdampingan dengan KJA Yensawai Timur



Gambar 1.A.2 Kerusakan pada pintu rumah jaga karena korosi

Kegiatan Review DED untuk Hiking Track di KKPD Misool dilakukan secara virtual pada tanggal 25 Oktober 2021. Kegiatan ini diikuti oleh Yayasan Terangi selaku pelaksana kegiatan paket 1, tim konsultan perencana pembangunan serta PIU WB. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan review terhadap kesesuaian design dengan kondisi di lapangan maupun dari sisi anggaran pelaksanaan pembangunan. Beberapa isu penting yang perlu diperbaiki antara lain masih kurang jelasnya elevasi bangunan dari atas permukaan air laut dan data awal pasang surut air laut untuk menentukan tinggi bangunan agar tidak terendam dan tidak terlalu jauh ketinggiannya. Terangi juga wajib segera menyampaikan draft UKL UPL ke ICCTF untuk direview bersama dengan WB, sebelum disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup Raja Ampat.



Gambar 1.A.3 Zoom meeting pembahasan DED hiking track Misool

b. Progres PrMid Term Evaluasi Mitra Pelaksana COREMAP – CTI World Bank

Pada tanggal 5-6 November 2021, ICCTF menyelenggarakan kegiatan Mid Term Evaluasi Mitra Pelaksana COREMAP – CTI World Bank di Jakarta. Hari pertama kegiatan tersebut, diisi oleh pemaparan Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas serta Direktur Eksekutif ICCTF terkait rencana kerja hingga tahun 2022. Selanjutnya, seluruh mitra pelaksana memaparkan capaian kegiatan serta rencana kerja hingga akhir program. Pada hari kedua, mitra pelaksana mengidentifikasi dan menyusun kegiatan yang akan dilakukan di termin 3, serta melengkapi laporan dan dokumen pendukung dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam kesempatan ini juga disampaikan tentang rencana perpanjangan kontrak proyek ICCTF dengan para mitra pelaksana sampai dengan Maret 2022 untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.



Gambar 1.A.4 Mid Term Evaluasi COREMAP-CTI di Jakarta

c. Working Group 2 Country Portfolio Performance Review (CPPR) Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia 2021

Pada tanggal 11 November 2021, ICCTF menghadiri kegiatan “Working Group 2 Country Portfolio Performance Review (CPPR) Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia 2021” yang merupakan undangan dari Direktur Kerja Sama Pendanaan Multilateral serta merupakan kegiatan lanjutan dari *Kick Off Meeting* yang telah dilakukan pada bulan sebelumnya. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh instansi yang mengelola dana dari Bank Dunia, baik berupa pinjaman maupun hibah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membahas portofolio kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia hingga tahun 2021, serta menyepakati langkah tindak lanjut bersama yang sistematis dan terukur. Working Group 2 ini berfokus untuk meningkatkan perencanaan dan persiapan proyek, serta implementasi dari *Environmental & Social Safeguards* pada seluruh proyek yang bersumber dari Bank Dunia.

The screenshot displays a Zoom meeting interface. The main content is a presentation slide with the following text:

TUJUAN

Tujuan pelaksanaan CPPR 2021 adalah untuk membahas portofolio kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia hingga 2021, serta menyepakati langkah tindak lanjut bersama yang sistematis dan terukur.

Ruang Lingkup CPPR 2021

1. Meningkatkan regulasi dan harmonisasi sistem Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.
2. Meningkatkan perencanaan dan persiapan proyek, serta implementasi dari *Environment and Social Safeguards*.
3. Meningkatkan kinerja proyek yang sedang berjalan.

Keluaran/Output CPPR

Pelaksanaan CPPR 2021 diharapkan menghasilkan keluaran berupa **langkah tindak lanjut bersama (joint action plan)** yang melingkupi: isu, langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan, penanggungjawab, dan waktu pelaksanaan langkah tindak lanjut tersebut.

PELAKSANAAN CPPR 2021

1. Kick-Off Meeting

2. Pembahasan dalam Working Group

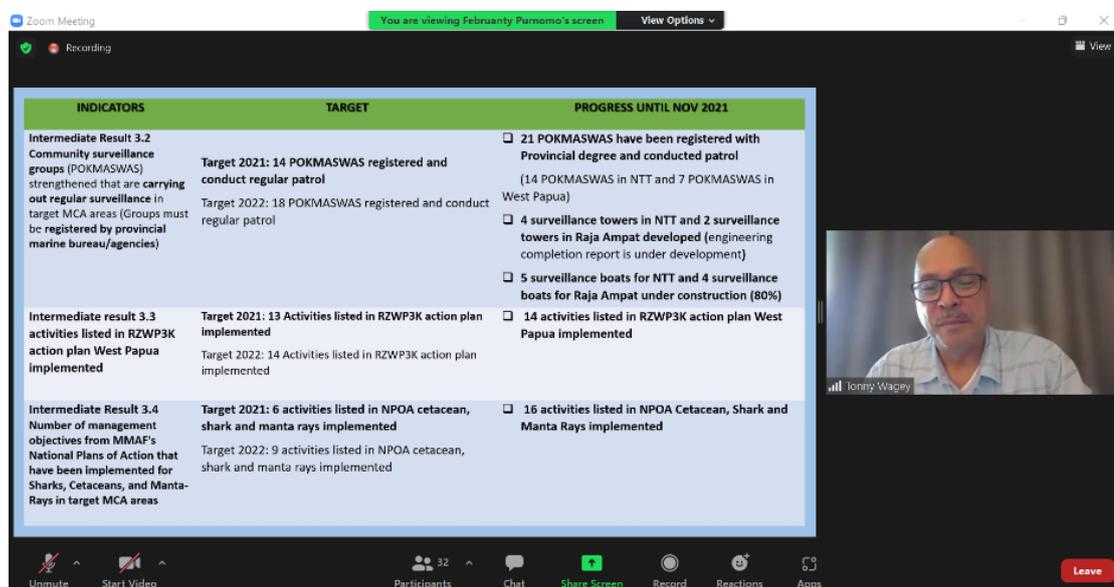
3. Wrap-Up Meeting

The slide also features the logo of the Indonesian Ministry of Finance (Kementerian PPN/ Bappenas) in the top right corner. The Zoom interface includes a 'Recording' indicator, a 'View Options' menu, and a video feed of a participant on the right side.

Gambar 1.A.5 Paparan oleh Direktorat Multilateral Bappenas

d. COREMAP-CTI World Bank Mission

Menindaklanjuti pre-Mission pada bulan September 2021, ICCTF menghadiri World Bank Mission pada tanggal 17-19 November 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan pada program COREMAP – CTI, seperti LIPI, Pusbindiklatren Bappenas, serta Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas. Pada kegiatan ini, ICCTF memaparkan capaian progress hingga bulan November 2021 serta kendala yang dihadapi. Hal penting lain yang juga dibahas dalam Mission kali ini adalah penyusunan *Implementation Completion Report (ICR)* serta *Legacy Review* yang mencakup perjalanan COREMAP I sejak tahun 1999. Selanjutnya, rencana aksi untuk perbaikan implementasi COREMAP – CTI yang diusulkan oleh Bank Dunia akan dituliskan dalam Aide Memoire yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.



Gambar 1.A.6 Paparan Direktur Eksekutif ICCTF

e. Training on Fisheries Management Practices: Application of Bio-Economic Approach to Shrimp Fisheries

Pada tanggal 24-26 November 2021, ICCTF PIU WB dan Staff ICCTF lainnya mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusbindiklat Bappenas *Training on Fisheries Management Practices: Application of Bio-Economic Approach to Shrimp Fisheries* yang merupakan bagian dari peningkatan kapasitas pada program COREMAP – CTI. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan peserta dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta asosiasi. Pada hari ketiga pelatihan, dilakukan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Benoa serta berdiskusi dengan Asosiasi Tuna Longline Indonesia.



Gambar 1.A.7 Diskusi kelompok pada Pelatihan Fisheries Management Practices

f. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Infrastruktur COREMAP – CTI World Bank

Sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi program, pada tanggal 28-30 November 2021 ICCTF mengadakan kunjungan lapangan untuk monitoring dan evaluasi infrastruktur COREMAP – CTI WB, khususnya pada infrastruktur yang dibangun oleh Terangi di Paket 1 dan Paket 5 yang berlokasi di Raja Ampat. Infrastruktur yang dikunjungi antara lain adalah Pusat Informasi Ekowisata di Miosara Kecil, Keramba Jaring Apung di Kampung Yensawai, serta Menara Pokmaswas di Swandarek. Dalam kegiatan ini juga dilakukan diskusi dengan kelompok masyarakat penerima manfaat. Dari diskusi masyarakat menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh program COREMAP-CTI WB melalui mitra pelaksana sangat memberi manfaat.

g. Meeting Group Regional COREMAP-CTI

Pada tanggal 13-15 Desember 2021 ICCTF PIU WB menghadiri meeting group regional COREMAP-CTI yang dilaksanakan oleh Paket 1 Terangi di Harris Vertue, Jakarta. Pada hari pertama pertemuan ini dipaparkan materi terkait MPA oleh Dr. Budi Wiryawan, materi EVIKA oleh Dir. KKHL – KKP, materi Neraca Sumber Daya oleh Pak Firdaus Agung dari KKHL – KKP, materi Martha Toolbox oleh Pak Safran dari Terangi, dan materi Allen Coral Atlas oleh Dr. Tries. Setelah pemaparan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi kelompok. Hari kedua dilanjutkan dengan diskusi kelompok dari kawasan konservasi daerah masing-masing untuk mendiskusikan nilai EVIKA. Hari ketiga dilanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok.

h. Penyusunan Exit Strategy COREMAP-CTI World Bank dan Kunjungan Lapang

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 15-18 Desember 2021 di Nusa Tenggara Timur. Pada hari pertama dilakukan kegiatan penyusunan exit strategy agar asset yang diberikan dapat berkelanjutan. Hasil dari diskusi ini ada beberapa usulan tentang bagaimana asset proyek dapat dikelola yaitu melalui dana desa, pendanaan pusat lewat Dana Alokasi Khusus (DAK), anggaran dinas terkait tingkat kabupaten dan provinsi, serta dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Hari kedua dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan lapang ke Pantai Oesina untuk melihat infrastruktur Pusat Informasi Ekowisata. Permasalahan yang masih perlu diselesaikan antara lain masalah kotoran ternak karena ternak dilepas dan masuk ke area pariwisata secara bebas dan area pariwisata tidak dipagar. Selain itu dilakukan kegiatan *sea trial* kapal pengawas di Kupang. Rute *Sea Trial* dimulai dari Pelabuhan Perikanan Tenau menuju perairan di sekitar Pulau Semau, jarak yang ditempuh +/- 6km.

Hari ketiga dilanjutkan dengan uji coba potensi wisata *Dolphin Watching* di Perairan Teluk Kupang. Perjalanan menuju Hansisi untuk melihat lokasi dimana sering ditemui lumba-lumba, mengambil dokumentasi lumba-lumba dengan penjelasan terkait pentingnya menjaga jarak antara kapal dan lumba-lumba hingga sebisa mungkin mematikan mesin kapal. Hari ketiga ditutup dengan pengisian kuisisioner oleh peserta dolphin watching sebagai bahan masukan bagi operator wisata dan review kesan pesan kegiatan.

1. Sub Komponen 3.1 Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Konservasi Jenis Terancam

1.1 Indikator 3.1 Infrastruktur Kecil Ekowisata

1.1.1 Paket Kegiatan 1 – Yayasan Terangi

a. Pembangunan Infrastruktur

Hingga Desember 2021, terdapat 5 unit infrastruktur yang telah selesai dibangun dan 2 unit infrastruktur lain sudah dalam tahap pembangunan.

Progres pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Yayasan Terangi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.A.1 Proses Pembangunan Infrastruktur COREMAP-CTI Paket 1

Infrastruktur	Status	Progres
Stasiun Pemantauan Pari Manta di Yefnabi Kecil (SAP Raja Ampat)	Konstruksi	100%
Stasiun Pemantauan Pari Manta di Dayan (KKPD Selat Dampier)	Konstruksi	100%
Pusat Informasi Ekowisata di Miosara Kecil (SAP Raja Ampat)	Konstruksi	100%
Jetty Apung di Meosarar (SAP Raja Ampat)	Konstruksi	20%
KJA di Mutus (SAP Raja Ampat)	Konstruksi	80%
KJA di Arefi Selatan (KKPD Selat Dampier)	Konstruksi	100%
KJA di Yensawai Timur (KKPD Selat Dampier)	Konstruksi	100%

b. Workshop dan Sertifikasi Pemandu Wisata Bahari

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 11-15 Oktober 2021 berlokasi di Waisai, Raja Ampat. Sasaran dari kegiatan ini adalah para pemandu wisata bahari yang berada di Raja Ampat dan sekitarnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas para pemandu wisata dengan pelatihan teknis kepanduan wisata bahari serta sertifikasi untuk para pemandu wisata. Peserta dari kegiatan ini terdiri atas perwakilan dari Bappenas dan ICCTF, perwakilan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, serta kelompok pariwisata di Raja Ampat.

1.1.2 Paket Kegiatan 2 – Yapeka

a. Pembangunan Infrastruktur Ekowisata Skala Kecil

Pada periode triwulan keempat, seluruh infrastruktur yang dikerjakan oleh Paket 2 telah selesai dibangun. Progres pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Yapeka di TNP Laut sawu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.A.2 Proses Pembangunan Infrastruktur COREMAP-CTI Paket 2

Infrastruktur	Progres Pembangunan
PLTS di Nusa Manuk	100%
Pusat Informasi Ekowisata di Sabu	100%
Pusat Informasi Ekowisata di Oesina	100%
Menara Pantau Cetecea di Semau	100%

b. Pembuatan film promosi ekowisata

Pada bulan Oktober 2021, mulai melakukan persiapan film promosi untuk ekowisata di Laut Sawu. Film promosi ekowisata tersebut ditargetkan selesai pada akhir program dan dapat digunakan sebagai media promosi ekowisata di Laut Sawu.

c. Pelatihan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang

Pelatihan teknik rehabilitasi dan transplantasi terumbu karang di pantai Oesina dilaksanakan pada 26-27 November 2021. Sekitar 20 peserta mengikuti pelatihan, dan 1 demplot terumbu karang dengan metode spider web (50 pcs).



Gambar 1.A.9 Peletakan Spider Web

d. Monitoring Infrastruktur PLTS di Nusa Manuk, Rote Ndao

Pada bulan November 2021, Yapeka mendampingi ICCTF untuk melakukan monitoring infrastruktur PLTS di Nusa Manuk, Rote Ndao pasca terjadinya Badai Seroja serta perbaikan yang dilakukan oleh kontraktor. Berdasarkan hasil monitoring, seluruh PLTS dapat berfungsi dengan baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain monitoring infrastruktur, dilakukan juga monitoring kepada kelompok masyarakat yang mengolah rumput laut menjadi makanan ringan. Pada sesi diskusi, masyarakat menyampaikan usulannya terkait program penyediaan air bersih, mengingat sulitnya air bersih di lokasi Nusa Manuk.

e. Finishing Infrastruktur Pusat Informasi Ekowisata (rangka paus pilot)

Pada periode November 2021, Yapeka melakukan finishing infrastruktur ekowisata, diantaranya dengan melakukan penggalian dan penyusunan kembali rangka paus pilot untuk disimpan dan sebagai bahan edukasi di Pusat Informasi Ekowisata di Sabu Raijua dan Oesina. Dalam ekskavasi rangka paus, Yapeka bekerja sama dengan tim dari Jurusan Biologi Universitas Gajah Mada.



Gambar 1.A.10 Kerangka Paus Pilot

f. Ekspose kegiatan Paket 2 COREMAP CTI

Ekspose kegiatan Paket 2 COREMAP-CTI dilakukan pada 14-18 Desember 2021. Kegiatan ini meliputi workshop penyusunan exit strategy, kunjungan lapangan di pantai Oesina dan expose kegiatan di pantai Oesina pada media.



Gambar 1.A.11 Ekspose dan Kunjungan lapangan ke pantai Oesina, Kabupaten Kupang

1.2 Indikator 3.4 Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Hiu, Cetacea dan Pari Manta

1.2.1 Paket Kegiatan 3 – Yayasan Reefcheck Indonesia

a. Pertemuan Nasional Penyusunan Panduan Laku Wisata Hiu, Pari Manta dan Cetacea

Kegiatan ini diselenggarakan dari tanggal 21-23 Oktober 2021 berlokasi di Bali, dengan jumlah undangan berjumlah sekitar 30 peserta. Dalam kegiatan tersebut, peserta dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim Cetacean dan tim Elasmobranch. Tim Cetacean melakukan praktik lapangan dengan melihat lumba-lumba di Lovina, sementara tim Elasmobranch melakukan praktik lapangan dengan diving dan snorkling untuk melihat Pari Manta di Nusa Penida. Selanjutnya pada hari terakhir draft panduan laku wisata kembali dibahas berdasarkan hasil praktik lapangan masing-masing tim. Finalisasi dokumen panduan laku diharapkan dapat segera dilakukan setelah pertemuan ini.



Gambar 1.A.12 Foto bersama kegiatan Penyusunan Pandu Laku Wisata

b. Lokakarya Pengoperasian Mobile App dan Sistem Database Sensus Populasi Pari Manta, serta Pengaplikasian Akustik dan Satelit Telemetri dalam Mendukung Konservasi Pari Manta

YRCI menyelenggarakan Lokakarya Pengoperasian Mobile App dan Sistem Database Sensus Populasi Pari Manta pada tanggal 10-14 November 2021 di Sorong. Kegiatan tersebut juga diikuti dengan Pengaplikasian Akustik dan Satelit Telemetri dalam Mendukung Konservasi Pari Manta. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai sarana transfer pengetahuan dari para narasumber serta peningkatan kapasitas dalam hal pengelolaan spesies terancam khususnya Pari Manta agar dapat berjalan dengan efektif.

c. Pembahasan Hasil Kajian Efektivitas Penggunaan Lampu LED sebagai Alat Mitigasi Bycatch Elasmobranchii di Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Provinsi Nusa Tenggara Timur

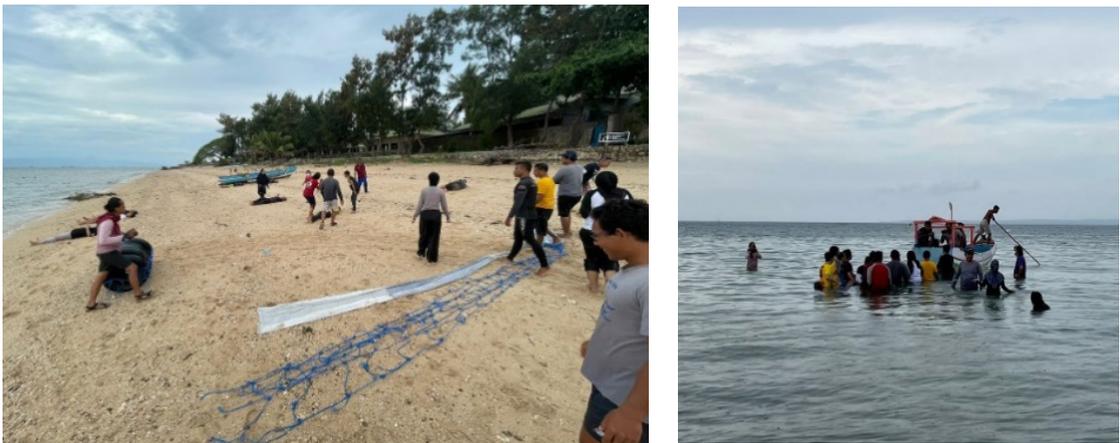
Pada tanggal 19 November 2021, YRCI menyelenggarakan Pembahasan Hasil Kajian Efektivitas Penggunaan Lampu LED sebagai Alat Mitigasi Bycatch Elasmobranchii di Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesi pertama kegiatan adalah Pemaparan Status Populasi dan Ancaman Hiu dan Pari Mobulidae di Indonesia oleh Pusat Riset Oseanografi, BRIN. Selanjutnya, materi Pembelajaran Pendataan dan Informasi Lainnya terkait Mobula di Flores Timur. Pada sesi kedua, YRCI memaparkan Hasil Kajian Mitigasi Bycatch Elasmobranchii dengan Lampu LED di Taman Nasional Perairan Laut Sawu, yang dilanjutkan dengan Penyampaian Pengalaman Melaksanakan Mitigasi Bycatch dengan Lampu LED oleh Nelayan Nuca Molas dan Nangalili.

d. Uji Coba dan Media Trip Wisata Spesies Berbasis Masyarakat Meos Manggara

YRCI menyelenggarakan Uji Coba Wisata Spesies Berbasis Masyarakat di Meos Manggara pada tanggal 22-25 November 2021. Uji coba dan media trip tersebut dilaksanakan dengan metode island hop on hop off di Kawasan Meos Manggara serta pengenalan dan identifikasi potensi penelitian. Peserta dari kegiatan tersebut adalah perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah, universitas, serta NGO.

e. Pelatihan Penanganan Kejadian Mamalia Laut Terdampar Bagi Para Penanggap Pertama dan Penguatan Jejaring Regional

YRCI menyelenggarakan Pelatihan Penanganan Kejadian Mamalia Laut Terdampar Bagi Para Penanggap Pertama dan Penguatan Jejaring Regional pada tanggal 22-24 November 2021 di Kupang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam menangani mamalia laut yang terdampar serta membuat usulan konsep jejaring dalam penanganan mamalia laut terdampar di sekitar Laut Sawu. Pada hari pertama, kegiatan diisi oleh pemaparan materi dari berbagai narasumber. Selanjutnya pada hari kedua, dilakukan praktik lapangan untuk penanganan mamalia laut terdampar. Pada hari terakhir, peserta berdiskusi terkait konsep jejaring/gugus tugas yang akan diusulkan untuk dibentuk. Pembentukan jejaring/gugus tugas bertujuan agar penanganan kejadian mamalia laut terdampar dapat lebih sistematis dan efisien serta dapat didasari oleh hukum.



Gambar 1.A.13. Praktik Penggunaan Jaring dan Alas untuk Mamalia Laut Terdampar Berukuran Besar serta Pelepasan Mamalia Laut Terdampar di Perairan Dalam

f. Sensus Populasi Pari Manta dan Kunjungan serta Liputan Media

YRCI melakukan kegiatan Sensus Populasi Pari Manta dan Kunjungan serta Liputan Media pada tanggal 23-29 November 2021 di Perairan Raja Ampat, meliputi: KKPD Selat Dampier, SAP Raja Ampat, dan SAP Waigeo Barat. Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada sensus populasi pari manta adalah pemantauan via drone dan snorkeling/menyelam, survey populasi pari manta dan maintenance receiver di Wayag, survey populasi pari manta di Yefnabi, serta survey populasi pari manta di Dayan.

g. Sosialisasi Regulasi Konservasi Hiu Karang, Pari Manta, dan Cetacea di Perairan Kabupaten Raja Ampat

Pada tanggal 29 November 2021, YRCI menyelenggarakan Sosialisasi Regulasi Konservasi Hiu Karang, Pari Manta, dan Cetacea di Perairan Kabupaten Raja Ampat di Waisai. Materi sosialisasi tersebut antara lain (1) Regulasi Jenis Hiu, Pari, dan Cetacea di Raja Ampat (Perda Raja Ampat 9/2012), (2) Regulasi Jenis Hiu, Pari, dan Cetacea di Indonesia (Nasional), (3) Upaya Konservasi Jenis Hiu, Pari, dan Cetacea di KKP Kepulauan Raja Ampat, dan (4) Upaya Konservasi Jenis Hiu, Pari, dan Cetacea di KKPN.

h. Pertemuan koordinasi pembahasan hasil kajian dinamika populasi elasmobranchii dari perikanan di Papua Barat

Kegiatan pertemuan ini dilakukan untuk memaparkan hasil uji coba penggunaan lampu LED sebagai alat mitigasi bycatch elasmobranch di perairan Desa Nangalili dan Desa Nuca Molas (Pulau Mules). Selain itu dilakukan juga pembahasan hasil uji coba ini bersama dengan stakeholder terkait seperti BKKPN Kupang, Kelompok Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Dit. KKHL KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Manggarai Barat, Yayasan Misool Baseftin, Yayasan WWF Indonesia, nelayan Desa Nangalili, dan nelayan Desa Nuca Molas. Dari hasil uji coba, penggunaan lampu LED mampu mengurangi jumlah bycatch Elasmobranch. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari nelayan Desa Nangalili dan Desa Nuca Molas.

i. Rapat Koordinasi Pokja RAN

Berdasarkan hasil rapat koordinasi pokja RAN cetacea, beberapa poin yang akan menjadi tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peran serta pemerintah daerah, Perguruan Tinggi dan swasta untuk sinergi pendanaan RAN konservasi mamalia
2. Mengoptimalkan peran penanggung jawab tiap tema
3. Sinkronisasi dan kelengkapan regulasi mamalia dengan K/L terkait
4. Mendorong ditetapkannya Kepmen KP tentang pedoman penanganan dan pelepasan mamalia laut dari Alat Penangkapan ikan
5. Menyusun SOP Struktur data dan spesifikasi produk data
6. Perencanaan riset terintegrasi
7. Mendorong penanggung jawab kegiatan tema agar mengoptimalkan kegiatan di RAN Konservasi

j. Sarasehan pembentukan/penguatan jejaring WSBM dengan pemerintah dan LSM

Pada kegiatan sarasehan yang dilanjutkan dengan kegiatan rangkaian pertemuan, pembahasan yang diangkat meliputi pembangunan jejaring pemasaran, promosi, dan pendampingan penjualan (dan pengemasan). Hal ini termasuk terlaksananya open house WSBM manta dan dolphin TNP Laut Sawu di Bandung, identifikasi perluasan pangsa pasar WSBM, seperti dengan kelompok yoga (trip yoga alam dan *wildlife*) dan industri fashion (trip *high fashion photo session* bertema WSBM), dan pembangunan koneksi dengan beberapa potensial outlet penjualan. Lebih lanjut, kelompok-kelompok masyarakat telah dibentuk dan atau diperkuat untuk mengelola dan menjadi representasi dari wsbm dan industri penunjangnya. Ini termasuk: pembentukan kelompok pembuat sabun manisray dan minano, penguatan BSP, POKDARWIS Oeseli, Naikean, dan Bo'a, kelompok camp Uiasa, kelompok Masadimawa dan Pokmaswas Meosmanggara. Dari proses pembangunan jejaring telah terbentuk kelompok DOMANI TIMUR KR4SERO, dimana kelompok-kelompok masyarakat yang telah dibentuk/dikuatkan sebelumnya di Meosmanggara, Rote, Semau, dan Kupang menjadi anggotanya. Laporan lengkap akan dimasukkan di dalam laporan pembangunan jejaring yang merupakan keluaran dari ToR konsultan tim wisata.

k. Survei kapal untuk menentukan kelimpahan relatif, mengambil sampel genetika, pemasangan tag, serta analisis kecocokan habitat mamalia laut

Survei kapal dilakukan pada tanggal 4-20 November 2021, dengan detail perjalanan sebagai berikut:

- Perjalanan ke Sabu Raijua dari Kupang (4-5 November 2021)
- Survei kapal mengikuti transek yang telah didesain di Sabu Raijua (6-9 November 2021)
- Perjalanan ke Kupang dari Sabu Raijua (10-11 November 2021)
- Survei kapal di wilayah Teluk Kupang dan sekitarnya (12-20 November 2021)

Terkompilasi hasil pertemuan dengan beberapa cetacea di sekitar perairan NTT yang tercatat adalah sebagai berikut:

1. Unidentified species = 20 perjumpaan
2. Balaenopteridae = 5 perjumpaan
3. Delphinidae = 8 perjumpaan
4. Blackfish = 3 perjumpaan
5. Stenella sp. = 2 perjumpaan
6. Blue Whale = 13 perjumpaan
7. Sperm Whale = 4 perjumpaan
8. Fraser's Dolphin = 2 perjumpaan
9. Rough-toothed Dolphin = 1 perjumpaan
10. Risso's Dolphin = 1 perjumpaan
11. Pilot Whale = 3 perjumpaan
12. Spotted Dolphin = 9 perjumpaan
13. Pygmy Killer Whale = 4 perjumpaan
14. Spinner Dolphin = 13 perjumpaan

Pada kegiatan ini, tim survei kapal juga berhasil melakukan pemasangan tag pada 3 cetacea berukuran besar, yaitu paus biru di tanggal 14 November 2021, paus sperma di tanggal 18 November 2021, dan paus biru lainnya di tanggal 19 November 2021. Semua pemasangan tag berhasil dilakukan di atas Pulau Semau kurang lebih 10 mil dari daratan terdekat. Kedua paus biru selama bulan November sudah mulai mengirimkan sinyal alur perjalanannya menuju ke arah Australia.

2. Sub Komponen 3.2 Pengelolaan Pesisir Terpadu (RZWP-3-K) Papua Barat

2.1 Paket Kegiatan 4 – PKSPL IPB

a. Pelatihan ICZM untuk masyarakat lokal

Kegiatan Pelatihan ICZM untuk masyarakat dilaksanakan pada tanggal 20-23 Oktober 2021 di The Coral Resort, Waisai, Raja Ampat. Kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari 7 Kampung di Kabupaten Raja Ampat. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat lokal di Papua Barat, khususnya di Raja Ampat terkait dengan konsep dasar ICZM.

b. Survey dan pengambilan data daya dukung

Kegiatan survey dilakukan di bulan Oktober dan bertujuan untuk melakukan pengambilan data lapangan yang berkaitan dengan daya dukung kawasan untuk kegiatan pariwisata, perikanan dan budidaya. Pengambilan data dilakukan di beberapa titik di Raja Ampat. Data- data tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana teknis pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan berdasarkan daya dukung.

c. Workshop Sosialisasi Pembuatan Sistem Monitoring dan Evaluasi RZWP3K Provinsi Papua Barat

Pada tanggal 12 November 2021, PKSPL IPB menyelenggarakan Workshop Sosialisasi Pembuatan Sistem Monitoring dan Evaluasi RZWP3K Provinsi Papua Barat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan sosialisasi sistem monitoring yang telah dibangun sehingga diharapkan diperoleh data program dan kegiatan yang terkait dengan RZWP3K, yang selanjutnya akan disusun kedalam suatu basis data yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder di Provinsi Papua Barat. Peserta yang hadir pada kegiatan ini adalah perwakilan dari beberapa instansi berikut: (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat, (2) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat, (4) Bappeda Kabupaten Raja Ampat, (5) Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat, (6) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik

Kabupaten Raja Ampat, (7) Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, (8) Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas, serta (9) ICCTF. Berdasarkan hasil diskusi pada kegiatan tersebut, diharapkan akan ada payung hukum mengenai tanggung jawab dari masing-masing instansi dalam penggunaan SIMONA. Selanjutnya, Politeknik Sorong juga menyampaikan bahwa siap berkontribusi mendukung keberjalanan system, terutama pada bagian SDM.



Gambar 1.A.14. Diskusi Sosialisasi Pembuatan Sistem Monitoring dan Evaluasi RZWP3K Provinsi Papua Barat

d. Perawatan dan pengawasan hasil rehabilitasi

Pada tanggal 30 November-6 Desember 2021, Tim PKSPL melakukan perawatan dan pengawasan rutin hasil rehabilitasi mangrove, lamun dan karang

3. Sub Komponen 3.3 Penatalayanan Sumber Daya Pesisir Oleh Masyarakat

3.1 Paket Kegiatan 5 – Yayasan Terangi

a. Pembangunan Menara POKMASWAS

Hingga bulan Desember 2021, pembangunan menara Pokmaswas di Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), dan Kabupaten Manggarai, progres pembangunan menara pengawas telah mencapai 100%. Progress pembangunan Menara POKMASWAS yang dilakukan oleh Yayasan Terangi sampai dengan kuartal 4 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.A.3 Proses Pembangunan Infrastruktur COREMAP-CTI Paket 5

INFRASTRUKTUR	STATUS	PROGRESS
Menara Pengawas di Meosmanggara (SAP Raja Ampat)	Konstruksi	100%
Menara Pengawas di Sauwandarek (KKPD Selat Dampier)	Konstruksi	100%
Menara Pengawas di Harapan Jaya (KKPD Misool)	Konstruksi	88%
Menara Pengawas di Sabu Raijua (TNP Laut Sawu)	Konstruksi	100%
Menara Pengawas di Rote Ndao (TNP Laut Sawu)	Konstruksi	100%
Menara Pengawas di Sumba Barat Daya (TNP Laut Sawu)	Konstruksi	100%
Menara Pengawas di Manggarai (TNP Laut Sawu)	Konstruksi	100%

b. Pembuatan Perahu Pengawas

Progres konstruksi pembuatan perahu pengawas untuk lokasi di Raja Ampat sudah mencapai 100% untuk 4 unit perahu pengawas. Untuk progres konstruksi pembuatan perahu pengawas untuk Laut Sawu juga sudah mencapai 100% untuk 5 unit perahu pengawas.



Gambar 1.A.15. Kapal Pengawas di Laut Sawu (kiri) dan Raja Ampat (kanan)

c. Workshop Pengawasan Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat Level 3 tentang Pengawasan dengan Teknologi Aerial

Pada tanggal 9-10 November 2021, Terangi menyelenggarakan Workshop Pengawasan Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat Level 3 tentang Pengawasan dengan Teknologi Aerial di Labuan Bajo. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pokmaswas, pemerintah daerah terkait, serta ICCTF. Beberapa materi yang disampaikan pada hari pertama antara lain adalah: (1) Peta dan pemetaan partisipatif, (2) Pengawasan Berbasis Teknologi Aerial, (3) Drone sebagai salah satu teknologi aerial dalam pengawasan kawasan konservasi, (4) Pengelolaan Data Teknologi Aerial, dan (5) Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3). Selanjutnya pada hari kedua, dilakukan uji coba praktik lapangan yaitu pelatihan penggunaan teknologi drone serta praktik penyusunan pemetaan partisipatif dengan menggunakan GPS.



Gambar 1.A.16. Uji coba pengoperasian drone serta penyusunan pemetaan partisipatif

d. Forum koordinasi POKMASWAS di Provinsi Nusa Tenggara Timur ke II

Terangi menyelenggarakan Forum koordinasi POKMASWAS di Provinsi Nusa Tenggara Timur ke II pada tanggal 11 November 2021 di Labuan Bajo. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi, komunikasi, informasi, dan sarana pembelajaran baik antar lingkungan POKMASWAS atau dengan pemangku kebijakan lainnya. Pada kegiatan tersebut disampaikan bahwa temuan pada kegiatan pengawasan yang dilakukan pada bulan Juni paling banyak berasal dari kapal penangkap ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan, abrasi pantai, pelanggaran zonasi, penambangan pasir, dan pembersihan pantai. Selain itu, POKMASWAS juga menemukan adanya penangkapan biota laut yang dilindungi seperti penyu, dugong, dan lumba-lumba. Selanjutnya, perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa perlu adanya video dokumentasi untuk keperluan pelaporan serta perlunya POKMASWAS untuk diberikan pelatihan dalam pelaporan melalui SMS Gateway DJPSDKP KKP.



Gambar 1.A.17. Diskusi dengan anggota Pokmaswas

e. Forum koordinasi POKMASWAS Raja Ampat ke I

Pada tanggal 23 November 2021, Terangi menyelenggarakan Forum koordinasi POKMASWAS Raja Ampat ke I di Sorong. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada POKMASWAS sehingga dapat berperan lebih besar dalam melindungi sumber daya kelautan. Forum ini juga diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi, komunikasi, informasi, dan sarana pembelajaran baik itu antar lingkungan POKMASWAS atau dengan pemangku kebijakan.

f. Workshop Pengawasan Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat Level 3 tentang Pengawasan dengan Teknologi Aerial

Terangi menyelenggarakan Workshop Pengawasan Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat Level 3 tentang Pengawasan dengan Teknologi Aerial di Sorong pada tanggal 23-24 November 2021. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pokmaswas, serta pemerintah daerah terkait. Kegiatan ini serupa dengan kegiatan yang dilakukan di Labuan Bajo. Beberapa materi yang disampaikan pada hari pertama antara lain adalah: (1) Peta dan pemetaan partisipatif, (2) Pengawasan Berbasis Teknologi Aerial, (3) Drone sebagai salah satu teknologi aerial dalam pengawasan kawasan konservasi, (4) Pengelolaan Data Teknologi Aerial, dan (5) Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3). Selanjutnya pada hari kedua, dilakukan uji coba praktik lapangan yaitu pelatihan penggunaan teknologi drone serta praktik penyusunan pemetaan partisipatif dengan menggunakan GPS.

3.2 Paket Kegiatan 6 – PILI

a. Finalisasi Dokumen RBSFM

Bulan Oktober kegiatan yang dilakukan adalah revisi draft RBSFM untuk tiga desa sesuai dengan hasil pertemuan dengan para pemangku kepentingan. Revisi dilakukan untuk penulisan yang konsisten dan memperhatikan informasi yang disampaikan agar mudah di pahami oleh pihak lain yang membaca dokumen RBSFM. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah sosialisasi dokumen RBSFM untuk kemudian dapat diimplementasikan di masing-masing KMHA.



Gambar 1.A.18 Dokumen RBSFM Kampung Mutus dan Desa Oelua

b. Pendampingan Penggunaan Peralatan Pendukung RB-SFM Bersama 4 POKMAS di Kampung Mutus, Kabupaten Raja Ampat

Pada periode bulan November 2021, PILI melakukan pendampingan Penggunaan Peralatan Pendukung RB-SFM Bersama 4 POKMAS di Kampung Mutus, Kabupaten Raja Ampat. Sesi pertama yaitu Penitipan peralatan pendukung RB-SFM bagi KUB Inkonem, KUB Mujur, Pokdakan Ingkoi, dan Pokdakan Korasuwan di Kampung Mutus, Kabupaten Raja Ampat dilakukan pada tanggal 2 November 2021. Selanjutnya, dilakukan Pendampingan instalasi dan penggunaan peralatan pendukung RB-SFM bagi KUB Inkonem, KUB Mujur, Pokdakan Ingkoi, dan Pokdakan Korasuwan di Kampung Mutus pada tanggal 3 November 2021. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 4 November 2021, dilakukan penyusunan Draft Peraturan Kampung Mutus.

c. Pendampingan Penggunaan Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan Bersama 2 POKMAS di Kampung Mutus, Kabupaten Raja

Kegiatan Pendampingan Penggunaan Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan Bersama 2 POKMASWAS di Kampung Mutus, Kabupaten Raja yang dilakukan oleh PILI selama bulan November diawali dengan Sosialisasi dan menyepakati aturan pemakaian peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan. Selanjutnya, dilakukan Penitipan peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan bagi Poklahsar Mandemor dan Poklahsar Manyarido di Kampung Mutus. Setelah dilakukan penitipan peralatan, PILI melakukan pendampingan instalasi dan penggunaan peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan bagi Poklahsar Mandemor dan Poklahsar Manyarido di Kampung Mutus.

d. Pendampingan Penggunaan Peralatan Pendukung RB-SFM bagi Kelompok Masyarakat di Kabupaten Rote Ndao

Serupa dengan kegiatan pendampingan peralatan pendukung RBSFM di Raja Ampat, kegiatan di Kab. Rote Ndao, diawali dengan Sosialisasi dan menyepakati aturan pemakaian peralatan pendukung RB-SFM. Selanjutnya, Pendampingan instalasi dan penggunaan serta penitipan peralatan pendukung RB-SFM bagi Kelompok Nale Tasi di Desa Sotimori dan KUB Bintang Selatan di Desa Oelua, Kabupaten Rote Ndao dilakukan oleh PILI pada tanggal 18-20 November 2021.

e. Pendampingan Penggunaan Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan Bagi Kelompok Masyarakat di Kabupaten Rote Ndao

Serupa dengan kegiatan di Kampung Mutus terkait pengolahan hasil tangkapan, pada tanggal 9 November 2021, dilakukan kegiatan Sosialisasi dan menyepakati aturan pemakaian peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan. Tahapan selanjutnya adalah Pendampingan instalasi dan penggunaan serta penitipan peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan bagi Poklahsar Tulufali di Desa Oelua, Kabupaten Rote Ndao. Kegiatan tersebut dilakukan oleh PILI pada tanggal 18-19 November 2021.

f. Midterm Meeting Group Regional CTI di 2 Lokasi Target: Kupang (NTT) Dan Sorong (Papua Barat)

Kegiatan ini merupakan lokakarya Peningkatan kapasitas unit pengelola KKL lokal untuk menilai efektivitas usaha pengelolaan, menyampaikan hasil penilaian efektivitas pengelolaan EVIKA 2020 dan self-assessments EVIKA. Kegiatan ini dilaksanakan di Harris Vertu Hotel Harmoni – Jakarta pada tanggal 13-15 Desember 2021

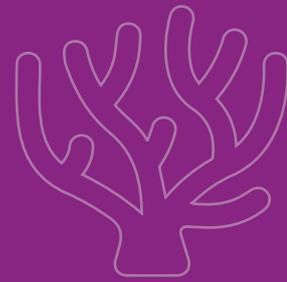


Gambar 1.A.19. Foto bersama peserta Workshop EVIKA (Desember 2021)

g. Workshop Exit Strategy di Kupang

Pada tanggal 14-18 Desember 2021 telah dilaksanakan workshop Exit Strategy untuk menjamin proses transfer aset, transfer knowledge dan operasional untuk proyek COREMAP-CTI WB.

B. COREMAP–CTI Asian Development Bank



Kegiatan COREMAP-CTI ADB

a. Koordinasi Alur Monitoring

Pada 19 Oktober 2021, PIU ADB menyelenggarakan koordinasi dengan seluruh *site coordinator* dan mitra pelaksana kegiatan COREMAP CTI-ADB yang bertujuan untuk menyepakati mekanisme monitoring untuk peningkatan kualitas pelaporan dan memastikan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Berikut kesimpulan dan tindak lanjut dari koordinasi tersebut:

1. Alur pelaporan akan disepakati dimana *site coordinator* diharapkan dapat mengirimkan laporan pada tanggal 1-7 setelah bulan implementasi. Kemudian pada setiap tanggal 7-15, tim ICCTF akan melakukan *review* dan memberikan saran perbaikan. Pada tanggal 25 setiap bulannya, laporan diharapkan sudah berstatus final dan menjadi referensi bagi *Creative Officer* untuk mengembangkan produk komunikasi yang diperlukan.
2. Panduan dan *outline* laporan akan dikembangkan untuk mendukung proses pelaporan yang efektif dan penjaminan kualitas laporan.
3. Perlu adanya panduan terkait definisi indicator/capaian yang nantinya mendukung standar kebutuhan bukti capaian/ *mean of verification*

b. Penyampaian Telaah DED Pusat Informasi GP2, Menara Pengawas GP 4 dan GP5

PIU ADB melakukan pertemuan dengan mitra pelaksana GP 2, 4 dan 5 pada 21 Oktober 2021 untuk menyampaikan tanggapan terhadap desain yang telah dikirimkan oleh Tenaga Ahli mitra pelaksana. Melalui pertemuan tersebut, kesimpulan umum yang dihasilkan adalah:

1. Perlu penyesuaian desain dengan desain bangunan sekitar yang telah ada
2. Struktur bangunan perlu didasarkan pada hasil uji karakteristik dan kondisi tanah
3. Revisi estimasi biaya perlu disusun berdasarkan pada masukan terkait bahan bangunan yang sesuai

c. Pertemuan Bersama Mitra GP 1 dan GP 4 terkait tindak lanjut Mekanisme Monitoring

Pada 29 Oktober 2021, PIU ADB menyampaikan kepada mitra GP 1 dan GP 4 terkait dengan *monitoring tools* yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelaporan kegiatan. Berikut adalah rangkuman peretemuan terkait mekanisme monitoring:

1. Pengisian pencapaian target berdasarkan output yang disepakati dan tercantum di dalam ToR akan dilakukan secara online
2. Mitra perlu mengisi perkembangan pencapaian output melalui pengisian status pencapaian *milestone/indicator* antara

Mitra nantinya dapat mengakses *dashboard* capaian secara online berisi informasi terkait pencapaian output dan kontribusi capaian kegiatan terhadap capaian output proyek Coremap CTI-ADB.

d. Monitoring GP 1-6

Pada tanggal 1-2 November 2021 dilaksanakan kegiatan Monitoring terhadap Grant Package 1 sampai dengan 6 untuk implementasi kegiatan COREMAP-CTI ADB. Output paket kegiatan dimonitor dengan menggunakan tools terintegrasi sehingga dapat memberikan informasi terkait dengan perkembangan pencapaian output kegiatan. *Tools* yang diusulkan menggunakan spreadsheet online yang berisi informasi terkait dengan output kegiatan, target, capaian per bulan dan keterangan capaian. Spreadsheet ini kemudian dihubungkan dengan google data studio sehingga masing-masing mitra dapat melihat grafik secara *real time*. Selain itu, capaian output dari paket kegiatan juga dihubungkan dengan output proyek sehingga dapat memberikan informasi mengenai kontribusi output kegiatan terhadap output proyek. Setiap mitra akan diberikan akses untuk memperbarui informasi capaian ke dalam *tools*. Hasil dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mitra setuju dengan mekanisme monitoring yang diusulkan yaitu dengan menggunakan spreadsheet dan data studio
2. Tools monitoring tidak hanya menyajikan informasi terkait dengan capaian namun juga perkembangan/progress
3. Tahapan capaian/milestone setiap output berbeda-beda sehingga perlu didasarkan pada ToR dalam menyampaikn informasi terkait dengan tahapan kegiatan.

e. Mid Term Evaluation Mitra Pelaksana Proyek COREMAP – CTI ADB

Pada tanggal 3-4 November 2021 dilaksanakan kegiatan mid term evaluation untuk mitra pelaksana COREMAP-CTI ADB. Pada pertemuan ini disampaikan perlunya perencanaan percepatan penyerapan anggaran. Oleh karena itu diperlukan Koordinasi intensif dalam pengadaan dan pengelolaan kegiatan serta monitoring tracking table masing-masing GP. Kesimpulan dan tindak lanjut setelah dari kegiatan ini, adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penyerapan anggaran 97% ditahun 2021
2. Memenuhi target-target kegiatan masing-masing GP
3. Meminimalisir hambatan yang muncul
4. Akuntabel dan transparansi kegiatan
5. Pengumpulan laporan masing-masing GP untuk dimonevifikasi dan dievaluasi
6. Penyusunan procurement 2022
7. Persiapan perbaikan DED untuk semua GP



Gambar 1.B.1 Foto bersama dengan seluruh perwakilan paket COREMAP-CTI ADB

f. Reviu TOR Mitra, Konfirmasi Jadwal Kegiatan dan Finalisasi Laporan Q3 2021

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021 melalui zoom meeting yang diikuti oleh PIU COREMAP-CTI ADB dan perwakilan dari GP 3, 4, dan 5. Pertemuan ini membahas TOR dan konfirmasi jadwal kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan masing-masing mitra di bulan November dan Desember 2021. Selain itu, pertemuan ini juga membahas laporan Q3 2021.



Gambar 1.B.2 Diskusi pembahasan TOR

g. Presentasi DED GP 1, 2 dan 3

Pada tanggal 15 November 2021 dilaksanakan pertemuan untuk menelaah kembali hasil revisi DED infrastruktur GP 1, 2 dan 3. Berikut adalah hasil pembahasan dari pertemuan ini:

➤ Tanggapan teknis terkait infrastruktur GP 1

- Mutu beton untuk GP 1 bisa diturunkan
- Survey lapangan akan dilakukan untuk bahan perancangan mutu beton
- Perlu ada revisi setelah kunjungan lapangan untuk memastikan rancangan struktur dan tiang

➤ **Tanggapan teknis terkait infrastruktur GP 2**

- Review lebih detil akan dilkauan setelah RAB revisi diterima
- AC bisa dimasukkan dalam perencanaan biaya

➤ **Tanggapan teknis terkait infrastruktur GP 3**

- Garis badan bangunan perlu dipatuhi
- Untuk menjadi perhatian terkait rencana pembangunan jalan di sekitar bangunan
- Foot plate terlalu kecil
- Kolom harus disesuaikan
- Plat lantai luar ketebalannya harus disesuaikan dengan fungsi
- RAB perlu segera dikirimkan

Ada pun berikut adalah tindak lanjut dari pertemuan ini:

- DED yang telah mendapat review final adalah infrastruktur GP 2 dimana proses selanjutnya adalah review final RAB
- Infrastruktur GP 1 dan 3 masih perlu penyesuaian desain rencana struktur karena masih memerlukan kunjungan lapangan untuk GP 1 dan konfirmasi terkait rencana pembangunan jalan untuk GP 3
- GP 1 akan melakukan kunjungan lapangan untuk penyeseuain rancangan struktur bangunan
- GP 2 akan mengirimkan RAB final untuk segera dilakukan review
- GP 3 perlu segera mengirimkan final RAB berdasarkan hasil review desain

PROGRESS KEGIATAN

1. Support for MPA Management and ETP NPOA Implementation

PAKET KEGIATAN 1

PT Trans Intra Asia (PT TIA) berkonsorsium dengan Yayasan Bahtera Nusantara

a. FGD Pembahasan Finalisasi Dua SOP prioritas

Pada bulan November telah dilaksanakan FGD Pembahasan Finalisasi Dua SOP Prioritas. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan KKP3K – KKP Direktorat Jenderal PRL, UPTD KKL Nusa Penida, Akademis, LSM untuk meningkatkan ekowisata berkelanjutan di Nusa Penida dengan output Tersusunnya 2 SOP prioritas.

b. FGD pembahasan Usulan Pelatihan Ekowisata Lestari

Pada bulan November telah dilaksanakan satu kali FGD terkait Pelatihan Ekowisata Lestari. Kegiatan ini dilakukan dengan UPTD KKL Nusa Penida, Dinas KP Provinsi, Operator Wisata, Asosiasi Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi, Komunitas, Ketua/Wakil Adat Masyarakat setempat dengan output kesepakatan target peserta serta modul yang akan digunakan dalam pelatihan.

c. Survei persepsi dan pengumpulan data awal kondisi wisata mola-mola

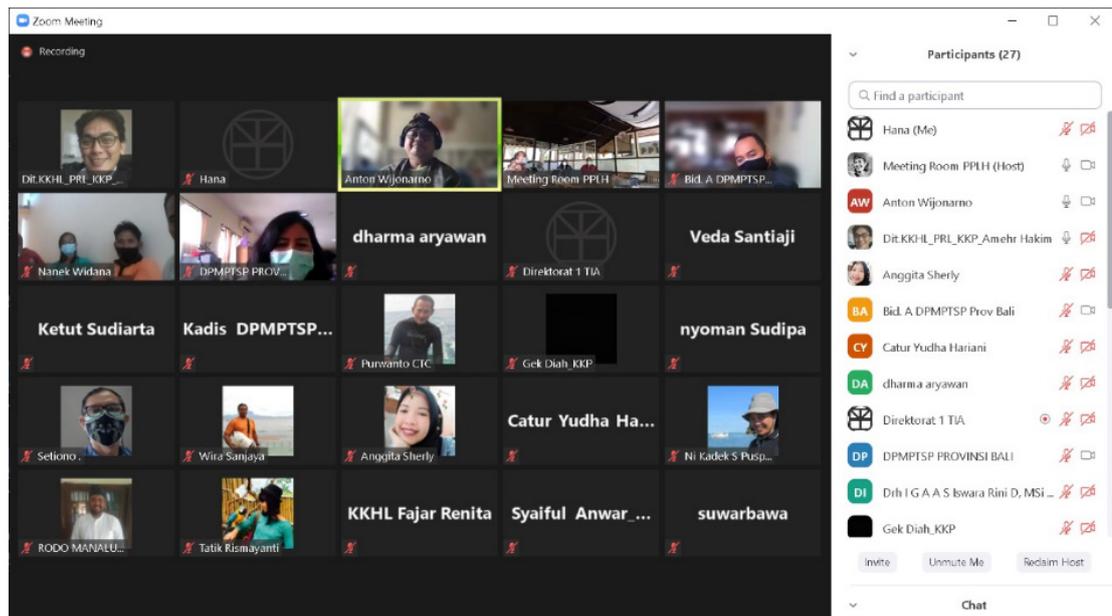
Pada bulan November telah dilakukan survey persepsi, pengumpulan data awal kondisi wisata mola-mola di KKP Nusa Penida dan satu kali FGD pembahasan metode survei daya dukung wisata mola-mola yang menghasilkan output metode survey daya dukung wisata mola-mola di KKP Nusa Penida yang disepakati

d. FGD mekanisme pungutan retribusi

Telah tersedia Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang didalamnya juga mengatur Retribusi Jasa Usaha di KKP Nusa Penida. Dengan disahkannya Perda ini maka UPT KKP ditunjuk sebagai pelaksana pungutan retribusi di dalam KKP Nusa Penida. Pelaksanaan retribusi akan dilakukan di tahun 2022, untuk itu telah dilakukan dua kali FGD mekanisme pungutan retribusi sepanjang bulan November dengan kesepakatan perlu dibentuk integrasi mekanisme pungutan dengan system satu pintu. Serta diperlukan aplikasi TMS sebagai bagian kemudahan pelayananyang diberikan oleh UPT KKP kepada masyarakat dalam mengimplementasikan pungutan Retribusi.

e. Survei Lapang Pembangunan Pusat Informasi Turis (Tourist Information Centre/TIC)

Telah tersedia draft DED dan telah dilakukan rapat koordinasi draft DED dengan UPT KKP serta telah dilakukan rapat koordinasi dengan Dinas lingkungan hidup dan Dinas Perijinan Kabupaten Klungkung untuk pengurusan IMB dan SPPL pembangunan pusat informasi wisata.



Gambar 1.B.3. Konsultasi SOP pengelolaan dengan Dit KKHL KKP

PAKET KEGIATAN 2

PT Duta
Cipta Mandiri
berkonsorsium
dengan PT Cakra
Buana Aghna
dan Yayasan
Ekosistem Gili
Indah/Gili Eco
Trust

a. Rapat Manajemen GP2

Rapat koordinasi dilakukan melalui zoom meeting pada tanggal 23 November 2021. Tujuannya adalah untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pada bulan November. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan, sehingga berpengaruh terhadap rancangan keuangan.

b. Penyusunan Draf SOP Prioritas

Kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat 26 November 2021, secara hybrid melibatkan Bappenas, BKKPN Kupang, Dinas Pariwisata KLU, Bappeda KLU,

Pokmaswas, dan Pokdarwis. Kegiatan dimulai dengan pemaparan Draft SOP (Terlampir) yang kemudian disepakati bersama. Poin-poin penting yang disepakati yaitu bagaimana SOP yang disusun akan digunakan melakukan rehabilitasi ataupun restorasi sesuai dengan skema dan mekanismenya, menentukan lokasi yang dianjurkan di dalam SOP, dan metode rehabilitasi dan sumber bibit dari mana serta jenis karang yang dianjurkan berdasarkan perundangan yang berlaku selanjutnya dalam setiap kegiatan itu terdapat pemeliharaan, pemantauan dan ada pelaporan rutin kepada pemerintah dalam hal ini BKKPN. Draft hasil penyusunan Dokumen SOP.

c. FGD Sosialisasi Draf SOP Prioritas

Kegiatan dilakukan pada hari Senin 29 November 2021, secara hybrid yaitu dilakukan secara offline di Gili Gaya Gallery, Kabupaten Lombok Utara dan diikuti secara virtual oleh Bappenas, BKKPN Kupang, Dinas Pariwisata, UPP II Pamenang, Bappeda KLU, Masyarakat, Pokdarwis, Pokmaswas. Kegiatan ini langsung dibuka oleh Bappenas dan BKKPN untuk memberikan pengantar, mengarahkan proses diskusi dan sekaligus membuka kegiatan.

d. FGD Pembangunan Pondok Informasi, *Boundary Signage*, dan *Sign Flag*

Perancangan rencana pembangunan pondok informasi telah dilaksanakan pada triwulan ini. Perencanaan pembangunan dan gambaran teknis terkait pembangunan telah dikoordinasikan dengan UPP II Pamenang. Bangunan Pondok Informasi awalnya akan dibangun di Bangsal kemudian dipindahkan ke Teluk Nare dengan alasan menyangkut masalah kepemilikan lahan. Kegiatan FGD dilakukan pada Rabu 01 Desember 2021 di Gili Gaya Galery Kabupaten Lombok Utara dengan Instansi terkait dan Pemerintah Desa dan Mitra Dinas Untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional TWP Gili Matra.

e. FGD One Gate System

Kegiatan ini dilakukan secara hybrid pada tanggal 3 Desember 2021 di Gili Gaya Gallery, Kabupaten Lombok Utara. Dalam kegiatan ini dipresentasikan konsep VMS yang ditawarkan kepada BKKPN Kupang sebagai pengelola kawasan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara sebagai pengelola pariwisata. Berdasarkan diskusi yang dilakukan, dihasilkan beberapa kesepakatan yaitu *One Gate System* dibangun terintegrasi dengan pemerintah daerah BKKPN Kupang TWP Gili Matra, UPP Pamenang, Disnav Banoa, stakeholder serta pemangku kepentingan dan kebijakan lainnya. Hasil dari kesepakatan ini terlampir.

f. Diskusi Penyepakatan dan Penunjukkan lahan pembangunan Pondok Informasi, *Boundary Signage*, dan *Sign Flag*

Perancangan rencana pembangunan pondok informasi telah dilaksanakan pada triwulan ini. Perencanaan pembangunan dan gambaran teknis terkait pembangunan telah dikoordinasikan dengan UPP II Pamenang. Bangunan Pondok Informasi awalnya akan dibangun di Bangsal kemudian dipindahkan ke Teluk Nare dengan alasan menyangkut masalah kepemilikan lahan. Kegiatan Diskusi ini dilakukan pada Rabu 8 Desember 2021 di Teluk Nare, Kabupaten Lombok Utara dengan UPP II Pamenang, Dinas Pariwisata KLU, Timi Kerja Pembangunan Daerah, Asisten II KLU, dan Pemerintah Desa beserta Mitra Dinas Untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional TWP Gili Matra.



Gambar 1.B.4 FGD 2 SOP Prioritas

PAKET KEGIATAN 3

PT Cakra
Buana Aghna

a. FGD Identifikasi Tujuan Dan Kegiatan Pembangunan Ekowisata

Kegiatan FGD Identifikasi Tujuan Dan Kegiatan Pembangunan Ekowisata di Gili Balu dilakukan pada tanggal 19 November 2021 di Hotel Santika, Mataram. Berdasarkan Pertemuan yang telah dilakukan, catatan penting yang diperoleh yaitu:

1. Tujuan pariwisata yang diperoleh adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kehidupan sosial dan ekonomi daerah melalui pariwisata berkelanjutan berbasis konservasi alam dan budaya
2. Kegiatan Wisata yang direkomendasikan antara lain:
 - SubSea (Kapal selam ekowisata)
 - Ada parkir perahu
 - Edukasi marine tourism
 - Pembuatan paket wisata sampai ke Mantar
 - paket wisata Adventure tourism
 - Paket untuk blogger dan backpackers
 - Wistawan khusus yang sudah ada paket wisatanya
 - Industri kreatif dan home industri
 - Travel patterns (titik Potensi) dan promosi paket wisata
 - Pendampingan kebijakan
3. Pengelompokkan dan Pendalaman kegiatan pariwisata ini akan didetailkan pada workshop tanggal 1 Desember 2021
4. Kajian lebih lanjut mengenai data trend pariwisata, tipologi wisatawan dan eksisting kebijakan daerah
5. Koordinasi dengan stakeholders (pentahelix) pariwisata harus lebih intensif terutama ke pemerintahan dari pusat sampai ke level CDK
6. Kajian tentang ekosistem yang ada perlu ditingkatkan tidak hanya yang ada di dalam laut melainkan juga di kawasan daratannya



Gambar 1.B.5 Foto bersama pada FGD Identifikasi Tujuan dan Kegiatan Ekowisata di Gili Balu

b. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal Kuliner Berbasis Ban Baku Lokal, Penerapan Chse Dan Pelayanan Prima

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal Kuliner Berbasis Ban Baku Lokal, Penerapan Chse Dan Pelayanan Prima dilaksanakan pada tanggal 21-22 November 2021 di Kantor COREMAP-CTI GP3 dan diikuti oleh perwakilan Pokdarwis di Sekitar Gili Balu. Pelatihan diselenggarakan selama 2 hari. Kesimpulan dari pelatihan ini adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan telah berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan, di mana para peserta telah memahami tujuan yang diinginkan dalam pelatihan ini.
2. Berdasarkan hasil testimony masyarakat peserta pelatihan sangat mengapresiasi pelatihan ini dan masyarakat sudah menyadari pentingnya pelayanan prima dan penyiapan kuliner yang berbasis CHSE dan ramah lingkungan berbasis bahan baku lokal
3. Hasil pelatihan ini dapat dijadikan untuk menjadi paket wisata yang lengkap dan pesertanya diikutsertakan di pelatihan pembuatan paket wisata yang akan dilaksanakan berikutnya

c. Workshop Review Rencana Pengelolaan TWP Gili Balu

Kegiatan Workshop Review Rencana Pengelolaan TWP Gili Balu diselenggarakan pada tanggal 25 November 2021 di Aston In Hotel, Mataram. Berdasarkan Workshop yang telah dilakukan, catatan penting yang diperoleh yaitu:

1. Selain kegiatan wisata seperti diving dan snorkeling di kawasan Gili Balu juga banyak dilakukan kegiatan pemancingan yang berpotensi juga untuk dijadikan wisata di Gili Balu, sehingga ikan-ikan target perlu di konservasi untuk menjaga stoknya. Perlu disampaikan dalam rencana pengelolaan alasan kuat kenapa ikan kerapu, kakap dan lencam dijadikan target konservasi di TWP Gili Balu.
2. Perlu belajar dari Gili Matra, di sana banyak aturan yang dilanggar dan banyak pembiaran. Jangan yang mengatur adalah pengusaha yang ada di dalam Kawasan.
3. Karena di Gili Balu Taman Wisata Perairan sehingga kegiatan di Gili Balu harus bernuansa wisata.
4. Dokumen ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di EVIKA

Untuk kegiatan kemitraan penting juga melakukan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan di Sumbawa barat misalnya PT Aman Mineral yang memiliki banyak CSR untuk kegiatan lingkungan

d. Penyusunan Draft Rencana Pengelolaan Zonasi TWP Gili Balu

Penyusunan draft rencana zonasi ini adalah tindak lanjut dari penetapan pada tanggal 6 September 2021, dimana TWP Gili Balu telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat Keputusan Nomor 74 Tahun 2021. Zona inti di TWP Gili Balu memiliki luas 608,69 hektar. Zona inti terletak di dua lokasi yaitu Pulau Belang seluas 514,24 ha dan Pulau Paserang seluas 94,46 ha. Zona pemanfaatan terbatas memiliki luas 4.947,78 hektar. Zona pemanfaatan terbatas terbagi menjadi dua wilayah yang dipisahkan oleh jalur kapal. Zona pemanfaatan terbatas 1 memiliki luas 3.353,97 ha, dan zona pemanfaatan terbatas 2 memiliki luas 1.593,81 ha. Zona lain sesuai peruntukan kawasan di kawasan konservasi Gili Balu berupa zona jalur kapal dengan luas 289,20 hektar.

Rencana Pengelolaan TWP Gili Balu disusun sebagai acuan di dalam mengelola kawasan dengan tiga kategori waktu perencanaan yaitu 1) Rencana Jangka Panjang (20 tahun), 2) Rencana Jangka Menengah (5 tahunan), dan 3) Rencana Jangka Pendek (Tahunan). Berdasarkan perencanaan yang telah disusun pada perencanaan jangka pendek dan menengah diharapkan dapat menghasilkan luaran yang telah direncanakan dan pada akhirnya seluruh capaian jangka pendek dan menengah akan terakumulasi menjadi luaran jangka panjang

e. Penyusunan Draft DED Pusat Informasi Ekowisata (*Ecotourism Information Center*)

Infrastruktur Pusat Informasi Ekowisata Gili Balu merupakan bangunan yang nantinya akan digunakan sebagai sarana dan prasarana pusat informasi kepariwisataan di Gili Balu. Infrastruktur Pusat Informasi Ekowisata memiliki ukuran bangunan sebesar 11 x 7.5 meter² yang mana memiliki bentuk panggung mengikuti bentuk umum bangunan tradisional di Desa Poto Tano dengan penjelasan mendalam pada dokumen *Detail Engineering Design* Infrastruktur Pusat Informasi Ekowisata.



Gambar 1.B.6 Tampak Depan dan Samping Pusat Informasi Ekowisata Gili Balu

2. Support for Ecosystem-based Resource Management Plans and Sustainable Marine-based Livelihoods

PAKET KEGIATAN 4

Coral Triangle Center

a. Pelatihan RUM dan Pokmaswas Baruna Jaya, Nusa Penida

Pada periode ini CTC telah melaksanakan satu kali pelatihan terhadap Pokmaswas Baruna Jaya, Desa Suana yang dilaksanakan pada tanggal 24-27 November 2021. Pelatihan ini memprioritaskan anggota Pokmaswas sebagai peserta, karena

bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan sumberdaya alam di Kawasan Konservasi Nusa Penida.

Kedepannya, diharapkan masyarakat dapat berperan secara aktif dan berkontribusi nyata dalam pengawasan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Nusa Penida. Pelatihan ini juga melibatkan UPT KKPD Nusa Penida sebagai pengelola kawasan dengan harapan terjadi sinergi pengelolaan antara UPTD KKPD dan Pokmaswas sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan KK Nusa Penida. Pelatihan Pokmaswas di Nusa Penida melibatkan peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari 4 orang perempuan dan 26 orang laki-laki yang terdiri dari 17 anggota Pokmaswas Baruna Jaya dan 13 orang adalah merupakan staf UPT KKP Bali kantor Nusa Penida.

b. Diseminasi hasil survei dan pertemuan warga untuk program rehabilitasi karang

Pada tanggal 29 Nopember 2021 telah dilakukan diseminasi hasil survei data dasar terumbu karang dan pertemuan masyarakat untuk merencanakan dan mendiskusikan rencana program restorasi terumbu karang di Nusa Penida. Sebanyak 38 peserta hadir dalam pertemuan yang terdiri dari 4 orang perempuan dan 34 laki-laki yang mewakili berbagai pemangku kepentingan.

Hasil pertemuan disepakati bahwa tiga lokasi termasuk kelompok masyarakat yang akan menjadi mitra utama yang diusulkan pada tabel di atas mendapatkan persetujuan dari para pemangku kepentingan meskipun detail teknis dan penggunaan metode/media tanam masih dapat berubah dan menyesuaikan dengan berbagai masukan pada pertemuan selanjutnya di tingkat desa dan kelompok masyarakat (direncanakan pada Januari 2022).

Perwakilan dari pelaku usaha yaitu dive operator dan asosiasi penyelam juga menyampaikan dukungan terhadap rencana program rehabilitasi karang ini dan siap membantu pada saat penurunan substrat. Begitupun dengan mitra dari NGO Indo Ocean Project, mereka telah menyatakan dapat memberikan dampingan teknis bagi para kelompok dan sharing pembelajaran mengenai keberhasilan rehabilitasi karang di *Crystal Bay* dengan menggunakan metode patok rumput laut dan metode ikat.

c. FGD studi Analisa biaya manfaat dan jasa lingkungan untuk program rehabilitasi terumbu karang dan mangrove

FGD dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2021 berlokasi di Nusa Penida yang dihadiri oleh perwakilan pemangku kepentingan yang terdiri dari; UPT KKP Bali, Pokmaswas, Kelompok Masyarakat, Majelis Desa Adat, Kepala Desa, pelaku usaha dan mitra NGO lainnya. Pertemuan dihadiri oleh sebanyak 42 orang yang terdiri dari 5 perempuan dan 37 laki-laki. Sebagian besar peserta undangan memberikan input yang baik terkait rencana studi analisis biaya manfaat terhadap program rehabilitasi terumbu karang dan mangrove di Nusa Penida. Bahkan, beberapa kelompok masyarakat sudah melakukan inisiatif secara swadaya untuk melakukan aktivitas perbaikan ekosistem terumbu karang melalui program rehabilitasi seperti yang dilakukan oleh Kelompok Nuansa Pulau di Desa Ped.

CTC mendapatkan banyak masukan dari kegiatan FGD tersebut. Beberapa diantaranya adalah desain pertanyaan kuisioner pada studi analisa biaya manfaat rehabilitasi karang dan mangrove di Nusa Penida. Salah satu yang paling ditekankan oleh masyarakat adalah, manfaat dari ekosistem terumbu karang tidak hanya dari sektor pariwisata tetapi juga dari sektor perikanan terutama perikanan demersal. Pengelolaan dan penegakan hukum yang baik di dalam Kawasan Konservasi Nusa Penida dapat memastikan keberlanjutan sumber daya alam meskipun dimanfaatkan baik secara ekstraktif maupun non ekstraktif oleh seluruh elemen masyarakat.



Gambar 1.B.7 Foto bersama pelatihan RUM dan Pokmaswas Baruna Jaya Desa Suana

PAKET KEGIATAN 5

PT Duta
Cipta Mandiri
berkonsorsium
dengan PT Cakra
Buana Aghna,
PT Ciriajasa
Engineering, dan
Yayasan Ekosistem
Gili Indah/Gili
Eco Trust

a. Laporan Teknis Restorasi Terumbu Karang, Baseline dan Data Penyelesaian, dan Analisis Biaya-Manfaat Restorasi Terumbu Karang

Salah satu implementasi proyek yang dilaksanakan GP 5 adalah pembuatan laporan teknis survei untuk mengidentifikasi lokasi tepat restorasi terumbu karang dan metode rehabilitasi yang sesuai, termasuk data baseline. Output ini bertujuan untuk menjadi data dasar dalam membuat strategi intervensi dalam memulihkan dan merehabilitasi setidaknya 5% dari terumbu karang yang rusak daerah melalui metode yang tepat dan di lokasi yang tepat.

Tahap akhir kegiatan diperoleh kesepakatan untuk upaya intervensi restorasi terumbu karang wilayah Gili Matra sebagai berikut:

1. Target luas restorasi 27520 m².
2. Zona inti meno tidak dilakukan restorasi.
3. Perlu ada penambahan titik survei kemudian ditentukan luas area restorasi.
4. Dari target luas restorasi dibagi menjadi 3 sesuai jumlah lokasi di Gili Matra, masing-masing Gili mendapat luas area restorasi 9173 m².
5. Luas masing-masing Gili dibagi menyesuaikan titik rusak dan memprioritaskan titik yang telah disurvei.
6. Lokasi tambahan dan intervensi restorasi

b. Perlengkapan minimal untuk 3 kelompok masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Gili Matra berbasis perikanan terumbu karang yang berkelanjutan termasuk ikan kakap

Dalam rangka melakukan pendampingan masyarakat untuk kegiatan pengolahan hasil perikanan, maka perlu dilakukan kaji cepat mengenai feasibility study untuk masing-masing jenis olahan ikan yang akan diusahakan oleh kelompok pengolah dan pemasar ikan. Melalui hasil kaji cepat tersebut akan diperoleh informasi mengenai jumlah bahan baku yang diperlukan dan jumlah produksi yang dihasilkan pada periode waktu tertentu sehingga usaha pengolahan ikan dapat memberikan keuntungan yang optimal. Adapun pendampingan kelompok pengolah hasil perikanan ini akan bersinergi dengan pendampingan kelompok nelayan, dimana hasil tangkapan nelayan menjadi bahan baku dari pengolahan hasil perikanan.

Tujuan kegiatan ini adalah, (1) mengidentifikasi kebutuhan modal investasi dan berbagai biaya yang dikeluarkan untuk melakukan usaha pengolahan ikan di sekitar TWP Gili Matra, (2) mengidentifikasi kapasitas sumber daya manusia pada kelompok dalam melakukan produksi produk olahan ikan di sekitar TWP Gili Matra, (3) melakukan kaji cepat feasibility study usaha pengolahan ikan di sekitar TWP Gili Matra, dan (4) mengidentifikasi produktivitas nelayan di sekitar TWP Gili Matra. Potensi sumber daya ikan di kawasan TWP Gili Matra dapat menjadi sumber bahan baku untuk mendukung kegiatan pengolahan ikan yang dilakukan oleh kelompok pengolah dan pemasar ikan.

Adapun jenis olahan ikan yang potensial untuk dikembangkan di kawasan TWP Gili Matra adalah bakso ikan, abon ikan, dan kerupuk ikan. Dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang menguntungkan, maka kegiatan produksi untuk pengolahan ikan tersebut dilakukan selama 2 kali seminggu selama 5 bulan dalam setahun dan 3 kali seminggu selama 5 bulan dalam setahun. Sementara itu, target jumlah bahan baku yang harus diolah setiap kali melakukan produksi untuk masing-masing jenis olahan adalah 15 kg untuk olahan bakso ikan, 20 kg untuk olahan abon ikan, dan 20 kg untuk olahan kerupuk ikan.

c. Koordinasi dengan otoritas pemerintah daerah selama pelaksanaan proyek dipertahankan

Kegiatan dibuka oleh Bapak Sukding selaku Kadus Gili Air. Kadus memperkenalkan tujuan kegiatan dan peserta serta pembicara dalam kegiatan tersebut. Pada sesi diskusi Kadus Gili Air menyampaikan bahwa masyarakat secara sadar mengetahui adanya kegiatan destructive fishing. Hal tersebut terbukti dari banyaknya laporan masyarakat tentang destructive fishing (kompresor) yg dilakukan oleh nelayan dr luar kawasan. Namun masyarakat belum melihat bentuk penindakan PSDKP utk nelayan dari luar TWP Gili Matra. Selain itu disampaikan pula bahwa jaring mourami merupakan alat tangkap yang paling banyak memberikan penghidupan bagi masyarakat nelayan. Perlu dikaji ulang penggunaan jaring mourami. Selain memberikan sosialisasi tentang penegakan hukum, diharapkan pemerintah juga memberikan solusi bagi masyarakat utk mengatasi pelarangan alat tangkap yang merusak. Pengelola kawasan menyampaikan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk perhatian negara kepada kehidupan masyarakat nelayan di gili ke depan. Sehingga kegiatan destruktif tidak langsung ditindak namun lebih banyak diberikan pembinaan untuk kebaikan bersama.

Perwakilan kelompok nelayan menyampaikan beberapa pandangan terkait sosialisasi destructive fishing salah satunya adalah memohon bantuan bentuk solusi pembinaan yang kongkrit untuk menggantikan mata pencaharian mereka sebagai nelayan jaring mourami. Selain itu, mereka berpendapat bahwa pengusaha juga harus dibina terkait sampah organik maupun anorganik dan pengerusakan karang.

Kegiatan sosialisasi dan pertemuan diakhiri dengan kesepakatan akhir adalah pihak PSDKP akan bertemu kembali dengan 3 orang perwakilan nelayan di kantor BKKPN Wilker Gili Matra dalam waktu dekat untuk menyelesaikan dan mencari solusi terbaik untuk kasus penangkapan nelayan pelaku destructive fishing.

d. Pelatihan rehabilitasi terumbu karang dan konservasi KKP diberikan kepada sedikitnya 20 orang dari masyarakat, staf sub-nasional dan nasional.

Kegiatan ini terdiri dari tiga (3) rangkaian workshop, yaitu:

➤ Workshop Identifikasi Substrat Dasar dan Biota Indikator Terumbu Karang

Kegiatan workshop ini merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan stakeholder terkait untuk meningkatkan pengetahuan ekosistem terumbu karang melalui identifikasi substrat dasar dan biota indicator ekosistem terumbu karang. Kegiatan workshop dilaksanakan dua hari terdiri dari kegiatan hari pertama adalah pemaparan materi oleh dua narasumber dan diskusi, kegiatan hari kedua adalah praktek lapangan untuk pengenalan identifikasi substrat dasar dan biota indicator ekosistem terumbu karang.

➤ Workshop Restorasi Terumbu Karang : Perkembangan Metode dan Studi Kasus

Kegiatan workshop ini merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan stakeholder terkait untuk meningkatkan pengetahuan restorasi terumbu karang. Kegiatan workshop dilaksanakan dua hari terdiri dari kegiatan hari pertama adalah pemaparan materi oleh dua narasumber dan diskusi, kegiatan hari kedua adalah praktek lapangan untuk identifikasi area restorasi terumbu karang dan metode yang sesuai.

➤ Workshop Monitoring Usaha Restorasi Terumbu Karang

Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk memonitor atau memantau usaha-usaha rehabilitasi/restorasi yang sedang atau akan dilakukan di Kawasan konservasi perairan terutama Gili Matra. Hal tersebut perlu dilakukan karena kunci kesuksesan sebuah kegiatan rehabilitasi dan restorasi adalah pemantauan dan perawatan struktur rehabilitasi yang telah dibangun dalam suatu Kawasan konservasi.

**PAKET
KEGIATAN 6**
SUCOFINDO

Dalam rangka melaksanakan program restorasi dan rehabilitasi mangrove telah dilakukan sebuah Pelatihan Penanaman Mangrove. PT Sucofindo bekerja sama dengan LSM lokal yang memiliki pengalaman dalam rehabilitasi mangrove yaitu Lembaga Olah Hidup (LOH). Kegiatan yang dilakukan oleh LOH dibawah

bimbingan dan arahan dari tenaga ahli Mangrove Restoration Expert dan berkolaborasi dan berkoordinasi Marine Biology Specialist. Program ini melibatkan 40 orang anggota masyarakat dari masing-masing 4 desa yaitu Desa Poto Tano, Kiantar, Senayan dan Tuananga dengan melibatkan 30% kaum perempuan.

GP 6 juga melaksanakan FGD Analisa Biaya Manfaat (*Cost Benefit Analysis*) Rehabilitasi Ekosistem Mangrove dan Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Kawasan Gili Balu Kabupaten Sumbawa Barat. Peserta pada kegiatan ini adalah masyarakat nelayan, pemuka masyarakat di sekitar kawasan kajian, perguruan tinggi, aparat pemerintah dari semua tingkatan yang terkait dengan ekosistem mangrove.

Selanjutnya dilaksanakan FGD Formulasi Strategi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perikanan, pada tanggal 9 Oktober 2021. Kegiatan FGD ini sangat antusias diikuti oleh masyarakat terutama dikalangan ibu-ibu yang berharap untuk mendapatkan informasi maupun pelatihan dalam pengolahan hasil perikanan.

3. master Degree Program

Empat Mahasiswa Program Magister menyelesaikan semester kedua tahun 2021 di University of Queensland, Australia dengan metode pembelajaran online. Urai Ridho dan Fathia mengambil empat mata kuliah serupa yaitu: i) Konservasi dan Biologi Satwa; ii) Perlindungan Lingkungan Laut dan Pantai; iii) Metode penelitian terapan; dan iv) Proyek Penelitian. Namun Zakiyah mengambil dua mata kuliah yang berbeda, yaitu i) Manajemen Karbon dan Energi, dan ii) Dinamika Sistem, iii) Metode Penelitian Terapan dan iv) Perlindungan Lingkungan Laut dan Pesisir. Sedangkan Amrullah mengambil: i) Metode penelitian terapan, ii) landasan pembangunan berkelanjutan, iii) Manajemen energi karbon, dan iv) People, Fire and Environment. Seluruh mahasiswa dinyatakan lulus studi pada semester kedua dan memenuhi syarat untuk melanjutkan ke semester berikutnya. Tabel di bawah ini menunjukkan skor IPK siswa

Tabel 1.B.1 IPK Mahasiswa Master Degree

Name	Gender	Score (GPA) S1, 2021	Sore (GPA) S2, 2021
Urai Ridho Abdussyahiid	Male	6,75	6,667
Ratu Fathia Rahmadyani	Female	6,25	6,00
Zakiyah Chairunnisa	Female	5,25	5,5
Amrullah	Male	-	6,00

IPB menyelenggarakan Workshop Research Plan for Master Degree yang dilaksanakan pada 18 November 2021 di Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam workshop tersebut, keempat mahasiswa berkesempatan untuk berdiskusi dan mengamati langsung proposal penelitian mereka dengan perwakilan dari Universitas, NGO, dan Pemerintah Daerah. Keempat siswa tersebut mengunjungi Gili Matra untuk mengeksplorasi lingkungan dan mewawancarai beberapa informasi penting untuk mengembangkan hipotesis mereka dengan lebih baik.



Gambar 1.B.8 Kunjungan Mahasiswa ke Gili Matra

C. BLENDED FINANCE



1. Konsolidasi Blue Finance bersama World Bank

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4-5 Oktober 2021 di Bandung. Tujuan dari pertemuan ini adalah merumuskan konsep dan menyatukan persepsi mengenai Blue Finance. Blue Finance disusun dengan tujuan agar daerah-daerah bisa mandiri dalam menjaga sumber daya alam sehingga masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga sumber daya alam. Hasil dari pertemuan ini antara lain:

- World Bank menginginkan komitmen pemerintah, yang diwujudkan dengan:
 1. *Policy Note*
 2. *Advisory Committee*
 3. *Concept Note*, dan
 4. *Object/Beneficiaries* dari Blue Bonds.
- Perlu dilakukan *reach out* ke K/L bersangkutan untuk melihat dan menganalisis *financing gap*. Perlu dilakukan pertemuan dengan pihak Kemenkeu, yaitu Wamenkeu MoF untuk mendapatkan saran siapa yang akan *involve* dalam pelaksanaan Blue Finance dan dengan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko MoF, selaku pihak yang akan meng-*issue* kegiatan Blue Finance.

2. Diskusi dengan UNDP

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021 secara daring melalui aplikasi zoom. Maksud dari pertemuan ini adalah mensinergikan ICCTF dan UNDP terkait program pendanaan serta membahas peluang potensi kerjasama. Diskusi dilakukan bersama Bapak Abdul Wahid Situmorang. Beberapa poin diskusi dalam rapat ini antara lain:

- UNDP bersama Kemenkomarves pada 2018 lalu telah menyusun program Blue Financing Framework. Fokusnya adalah tapping kepada blue bond dan blue sukuk dengan belajar dari kesuksesan green bond dan green sukuk.

- Pada 2019 Blue Financing Framework ini launching. Namun pada 2020 akhir, Kemenkeu expand menjadi SDGs Security Framework dengan tema yang diusung hanya green dan sosial. Proses disini cukup panjang, namun pada akhirnya Kemenkeu berhasil diyakinkan bahwa blue dan green berbeda sehingga saat ini blue bond dan blue sukuk sudah masuk kedalam SDGs Security Framework dan disahkan secara resmi pada bulan September lalu.
- Jika Indonesia mau mengeluarkan Blue Bond atau Blue Sukuk sebenarnya sudah bisa karena framework-nya sudah di-assesst dengan 3rd party yaitu CICERO. Namun masih perlu adanya Blue Principal, saat ini baru ada Green Principal, ini yang menjadi PR. Blue Principal dibutuhkan agar negara dapat di-assesst oleh 3rd party sehingga meyakinkan global capital market.
- Tiga stakeholder yaitu Kemenkeu, Kemenkomarves, dan Bappenas diharapkan dapat duduk bersama untuk membicarakan penerbitan Blue Bond



Gambar 1.C.1 Diskusi ICCTF dengan UNDP

3. Diskusi Potensi Kerjasama dan Kolaborasi untuk Pengembangan *Sustainable Blue Financing (Blue Bond)*

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 secara daring melalui aplikasi zoom. Maksud dari kegiatan ini mendiskusikan blue financing dengan BNI. Ibu Andhina Budianie dari BNI menyampaikan bahwa dalam sektor perikanan BNI sudah melakukan berbagai program kemitraan kepada nelayan dan juga melalui KUR. Untuk level menengah BNI juga melakukan kemitraan dengan perusahaan misalnya dalam pengadaan kapal dan penangkapan ikan.

Terkait green bond, BNI masih dalam persiapan pada tahun 2022. Namun untuk blue bond, BNI sampai saat ini memang belum kearah tersebut. BNI masih membutuhkan informasi dan kriteria yang jelas mengenai mekanisme ini. Pertimbangan lainnya adalah seberapa besar kebutuhan likuiditas dari perbankan. Hal yang sangat mempengaruhi lainnya adalah apakah ada enforcement dari regulator atau G20 yang dapat memicu perbankan dalam penerbitan green/blue bond. Setelah pertemuan ini, ICCTF akan mempersiapkan lebih lengkap mengenai kriteria dan guideline mengenai blue bond. Pihak BNI sangat terbuka untuk diskusi selanjutnya dan akan mengundang pihak lain seperti pelaksana atau koordinator teknis di lapangan untuk ikut serta.

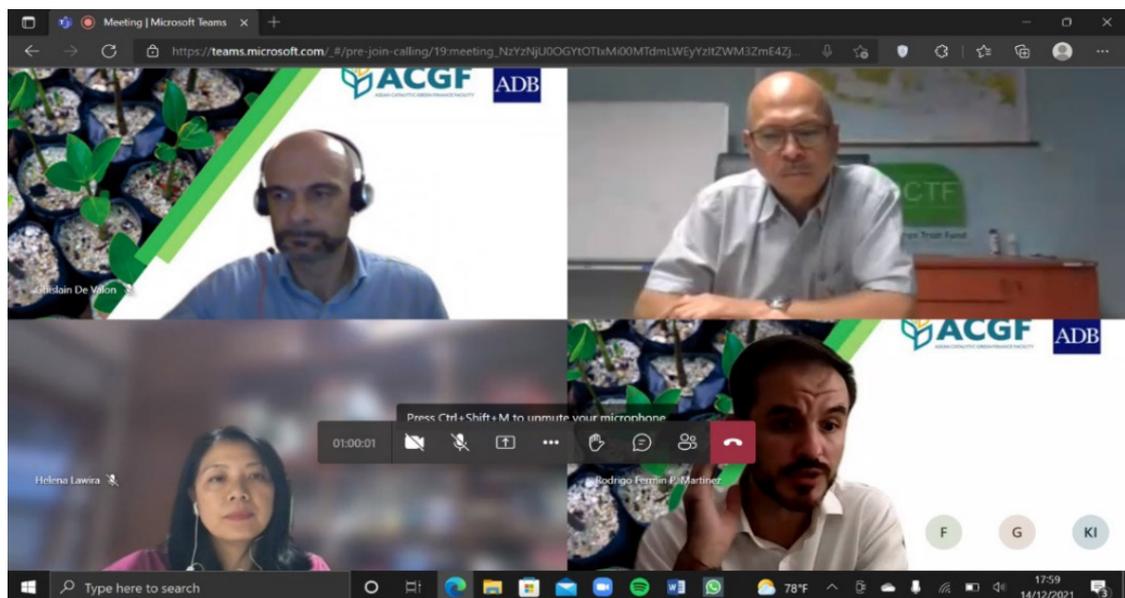


Gambar 1.C.2 Diskusi dengan perwakilan BNI

4. ADB Support to Blue Finance

Pertemuan dengan ADB dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2021 dengan agenda pembahasan proposed consultant ToR. Berikut adalah poin-poin hasil dari pertemuan ini:

- Akan ada link antara taksonomi dan proyek yang eligible, seperti apa tipe proyek, keberlanjutan pendanaan, dan sebagainya
- Specialist akan melakukan pembuatan template dan kriteria; pengembangan proyek; dan *collating* proyek. Selain itu, specialist akan meng-*encourage* proyek yang eligible sehingga diperlukan *framework* yang kuat untuk specialist tersebut. Specialist perlu benar-benar mengerti tentang blue bond
- Perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan sector lain seperti Perhubungan, ESDM, dan KLHK.
- Akan ada Workshop yang rencananya akan diselenggarakan dalam waktu 6 bulan kedepan setelah Desember



Gambar 1.C.3 Diskusi dukungan ADB untuk Blue Finance

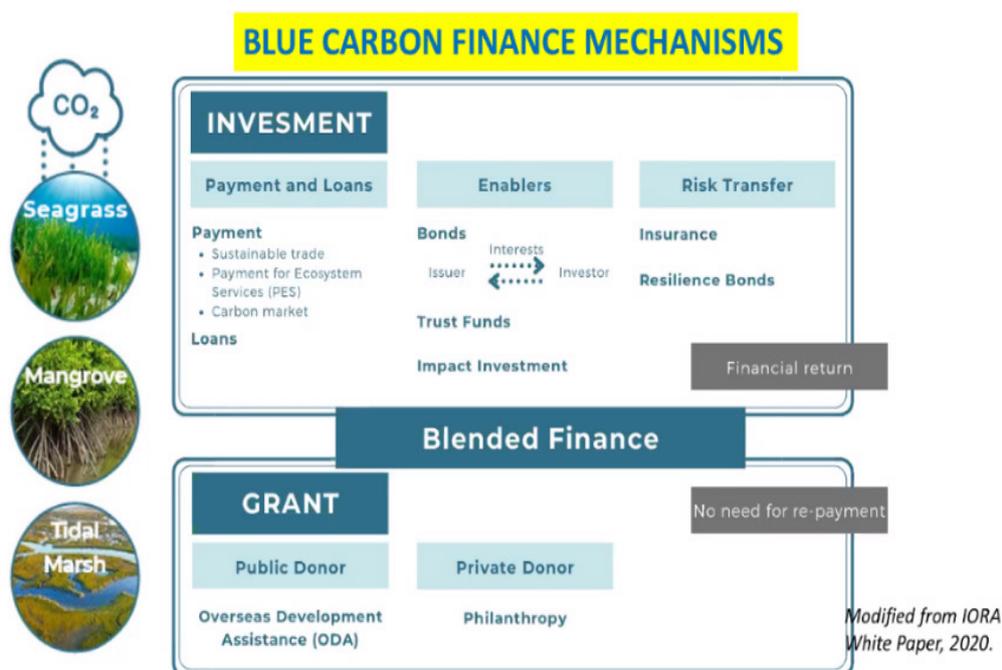
D. BLUE CARBON

1. Webinar *Blue Carbon Finance for Coastal Resilience Development*

ICCTF menghadiri undangan webinar *Blue Carbon Finance for Coastal Resilience Development* pada tanggal 6 Oktober 2021. Tujuan dari pertemuan ini adalah mendiskusikan pendekatan inovatif untuk memobilisasi pendanaan untuk ketahanan pesisir dan masyarakat yang rentan.

Sebagai pemapar pertama, Andreas A. Hutahaean, mewakili Kemenkomarves dan National Focal Point Blue Economy of Indonesia in IORA, menyampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

- Indonesia sedang menyiapkan regulasi mengenai *carbon pricing*. Harapannya tahun depan program ini sudah bisa diimplementasikan.
- Dalam dinamika karbon di vegetasi pantai sebenarnya karbon terbesar tersimpan bawah tanah. Sehingga perlu pengamatan lebih lanjut dari penginderaan jauh yang hanya mencakup 20-30% bagiannya saja
- Carbon Accumulation Rates (CAR) terdapat di Berau, Indonesia.



Gambar 1.D.1 Pemaparan mengenai carbon pricing yang disampaikan oleh Andreas A. Hutahaean

Selanjutnya sebagai Narasumber kedua adalah Amy Schmid dari lembaga VERRA. Beliau menyampaikan beberapa poin berikut:

- Pengenalan mekanisme VCS dalam restorasi dan konservasi lahan basah sebagai program terkait Gas Rumah Kaca (GRK) secara sukarela yang paling banyak digunakan di dunia.
- VCS dalam proses sertifikasinya seperti memilih metodologi yang sesuai sampai proyek mendaftar dan menerbitkan Verified Carbon Unit (VCU).
- VCS memiliki satu contoh proyek di Indonesia yaitu Proyek Restorasi Mangrove Sumatera.

Kemudian sebagai Narasumber terakhir adalah Megan Evans dari UNSW Australia. Beliau menjelaskan beberapa poin berikut:

- Pengenalan pendekatan inovatif untuk memobilisasi *finance for conservation*.
- Dalam instrumen kebijakan, pendekatan inovatif dapat berupa perangkat pemerintah atau instrumen berbasis pasar.
- Dalam kemitraan, pendekatan inovatif dapat berupa kemitraan publik-swasta atau manajemen publik baru.
- Meningkatkan *biodiversity finance* membutuhkan transformasi penggunaan lahan skala besar.

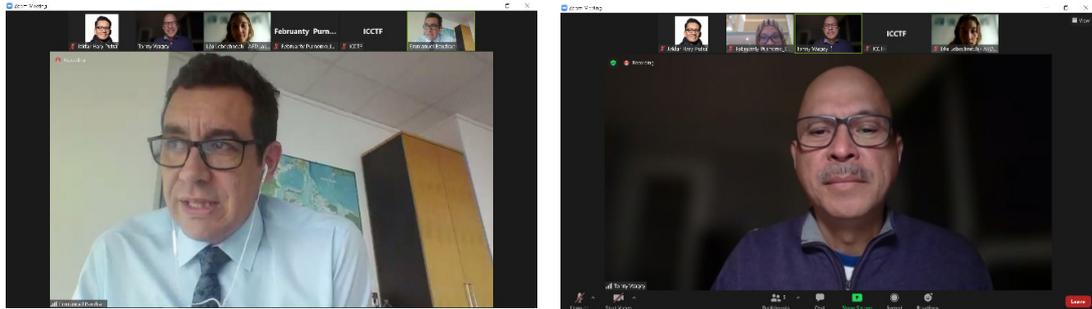


Gambar 1.D.2 Diskusi kegiatan yang dimoderatori oleh Matt Vanderklift dari CSIRO, Australia

2. Diskusi Proposal Blue Carbon dengan AFD

Rapat Pembahasan Proposal Blue Carbon dengan AFD dilaksanakan pada tanggal 4 November 2021 secara daring melalui aplikasi zoom. Agenda pertemuan ini membahas tindak lanjut proposal ICCTF-AFD Concept Note on Blue Carbon to 2050 Facility Program. Hasil dari pertemuan ini, antara lain:

- Menteri Perancis akan datang ke Indonesia untuk membahas kerjasama program energi dan mangrove pada tanggal 23-24 November 2021
- AFD telah mengirimkan dan menyajikan catatan konsep kepada tim Fasilitas 2050 untuk hibah sebesar EUR 600.000. Perlu beberapa klarifikasi terkait detail kegiatan, seperti:
 1. Bagaimana menghubungkan antara kebijakan dan program implementasi?
 2. Apa outcome dari proyek?
 3. Bagaimana memobilisasi sektor swasta untuk tertarik ikut dalam program?
- Respon pembaruan dari Fasilitas 2050 akan dilakukan pada akhir November 2021 setelah Kunjungan Menteri Prancis ke Indonesia



Gambar 1.D.3 Diskusi pembahasan proposal blue carbon antara ICCTF dengan AFD

3. Side Event COP26 pada Pavilliun Australia

Pada tanggal 6 November 2021, dilaksanakan Side Event COP26 bertempat di Paviliun Australia dengan judul “How Can Blue Carbon Policies be Designed to Drive Sustainable and Effective Change”. ICCTF mengikuti kegiatan ini secara daring melalui aplikasi Zoom. Pada sambutan pembuka, Angus Taylor, Menteri Energi dan Pengurangan Emisi Pemerintah Australia menyampaikan bahwa Australia dan tiga negara di Pasifik, yaitu Indonesia, Fiji dan Papua Nugini menyimpan 20 persen karbon biru dunia. Oleh karena itu Pemerintah Australia tengah mengimplementasikan program kerja sama dengan ketiga negara.

Pemerintah Indonesia melalui Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, menyambut baik kerja sama di kawasan Pasifik ini. Beliau juga menekankan bahwa komitmen Indonesia dalam mendukung pengurangan emisi karbon ditunjukkan melalui penyerahan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), termasuk pembahasan karbon biru. Dokumen yang diberikan kepada UNFCCC ini memuat strategi jangka panjang untuk ketahanan karbon dan iklim 2050.

Direktur Eksekutif ICCTF, dalam paparannya kemudian menjelaskan mengenai Indonesia Blue Carbon Strategy Framework (IBCSF). Beliau menyampaikan bahwa dalam merancang kebijakan blue carbon, Indonesia mempertimbangkan tiga aspek, yaitu riset dan standar protokol dalam pengukuran blue carbon serta identifikasi kesenjangan program; kedua, roadmap dan strategi pendanaan blue carbon; dan ketiga, penguatan kerjasama kelembagaan, dan kerangka hukum terkait dengan kebijakan blue carbon.

The poster is for a side event at the Australian Pavilion during the UN Climate Change Conference UK 2021 (COP26 Glasgow) on Saturday, 6 November 2021. The event is titled "How Can Blue Carbon Policies be Designed to Drive Sustainable and Effective Change?". It is organized by the Australian Government, Department of Industry, Science, Energy and Resources, in partnership with the Indonesian Deputy Minister for Maritime and Natural Resources, Government of Indonesia, and the ICCTF (International Centre for Climate Change Technology and Innovation Facilitation). The event will be held via Zoom from 9am-10am Glasgow, 4pm-5pm Jakarta, and 8pm-9pm Canberra. The poster lists several speakers and a panel discussion facilitator. The speakers include Dr. Ir. Arifin Rudyanto M.Sc. (Indonesian Deputy Minister for Maritime and Natural Resources, Government of Indonesia), Mr. James Larsen (Australian Climate Coordinator, Government of Australia), Mr. Alfred Rungol (Climate Change and Development Authority, Government of Papua New Guinea), and Hon. Angus Taylor (Minister for Energy and Emissions Reduction, Government of Australia). The panel discussion facilitator is Catherine Lovelock, University of Queensland. The closing and summary of discussions facilitator is Prof. Catherine Lovelock, University of Queensland.

Side event:
Designing Blue Carbon Policy for Sustainable Outcomes.

Kementerian PPN/
Bappenas

ICCTF

Australian Government
Department of Industry, Science,
Energy and Resources

UN CLIMATE
CHANGE
CONFERENCE
UK 2021

How Can Blue Carbon
Policies be Designed
to Drive Sustainable
and Effective Change?

Saturday,
6 November 2021

Australian
Pavilion

9am-10am Glasgow
4pm-5pm Jakarta
8pm-9pm Canberra

Senior Official Presentations and Launch of Blue Carbon Program Products :

Dr. Ir. Arifin Rudyanto M.Sc.
Indonesian Deputy Minister for Maritime and
Natural Resources, Government of Indonesia
[pre-recorded video].

Mr James Larsen
Australian Climate Coordinator,
Government of Australia [live]

Mr Alfred Rungol
Climate Change and Development
Authority, Government of Papua
New Guinea [live].

Hon. Angus Taylor
Minister for Energy and Emissions
Reduction, Government of Australia
[pre-recorded video]

Panel Discussion Facilitator: Catherine Lovelock, University of Queensland :

Dr. Tonny Wagey
Executive Director ICCTF, Ministry of National
Development Planning, Government of Indonesia.

Dr. Mat Vanderklift,
CSIRO, Australia.

Ms. Debra Sungi,
Climate Change Development
Authority, Government of PNG.

Closing and Summary of
Discussions Facilitator:

Prof. Catherine Lovelock
University of Queensland

Gambar 1.D.4 Poster Side Event COP26 dengan isu blue carbon

4. Rapat dengan DISER

Rapat antara ICCTF dengan DISER dilaksanakan pada tanggal 26 November 2021 secara daring melalui aplikasi zoom. Agenda pertemuan ini membahas rencana kerja dan potensi kerjasama untuk tahun 2022. Pemerintah Australia saat ini tengah mengimplementasikan dua program blue carbon bersama Indonesia, Fiji dan Papua Nugini. Kedua program tersebut adalah penyiapan dokumen tentang implementasi IPCC Wetlands Supplement dan rencana kursus pelatihan kebijakan karbon biru untuk negara di kawasan Pasifik. ICCTF dan DISER akan terus berkoordinasi untuk melanjutkan kerjasama tersebut pada tahun 2022.

5. Webinar of Renewable Energy Summit 2021

Webinar dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia tengah berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi menuju Net Zero Emission (netralitas karbon) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk itu, diperlukan perumusan sejumlah kebijakan, salah satunya mengenai blue carbon. Chakra Giri Energi Indonesia sebagai salah satu *private sector* mewadahi diskusi dengan judul “Blue Carbon sebagai Bagian Proses Dekarbonisasi untuk Net Zero Emission di Indonesia”. Webinar ini adalah bagian dari rangkaian webinar mengenai renewable energi yang diselenggarakan oleh Chakra Giri Energi Indonesia dan ICCTF berkesempatan menjadi salah satu narasumber untuk menyampaikan paparan mengenai potensi dan tantangan blue carbon.

Poin-poin utama yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif ICCTF antara lain sebagai berikut:

1. Ekosistem blue carbon Indonesia sangat penting karena mampu menyimpan hingga 3,3 giga ton karbon
2. Sejumlah ancaman terhadap ekosistem blue carbon antara lain deforestasi, penebangan liar, reklamasi, sedimentasi, dan pencemaran
3. Upaya Indonesia didalam pengurangan emisi global dan perubahan iklim tertuang di dalam Nationally Determined Contributions (NDC)
4. Bappenas dan ICCTF mengelaborasi SDGs, RPJMN 2020-2024 dan blue economy
5. Indonesia memiliki potensi dan tantangan energi biomassa pesisir berupa arang kayu bakau melalui pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) mangrove
6. Indonesia juga memiliki potensi dan tantangan energi laut yang bersumber dari energi pasang surut, energi gelombang dan energi panas laut.

RPJMN, SDG's & Blue Carbon

BLUE ECONOMY

13 CLIMATE ACTION Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim

14 LIFE BELOW WATER Meningkatkan konservasi laut & pengelolaan berkelanjutan

blue carbon

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan iklim

RPJMN 2020-2024

- Pemulihan Pencemaran & Kerusakan SDA & LH
- Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir & Laut
- Peningkatan Ketahanan Iklim
- Perlindungan Kerentanan Pesisir & Sektor Kelautan
- Rendah Karbon Pesisir & Laut
- Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan

Gambar 1.D.5 Paparan Direktur Eksekutif ICCTF mengenai potensi dan tantangan blue carbon

2 | Program Strategis dan Penggalangan Dana (*fundraising*)

2.1 Undangan Konferensi SDGs Tujuan 14: Ekosistem Lautan

Pada tanggal 26-27 Oktober 2021, ICCTF menghadiri undangan Konferensi SDGs Tujuan 14: Ekosistem Kelautan. Acara ini adalah rangkaian dari Konferensi Nasional Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Laut ke-10. Dalam sambutannya, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kolektif dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan.



Gambar 2.1. Sambutan oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas

Tema pada hari pertama terkait dengan *Government policy*. Narasumber pada hari pertama ini antara lain, Ibu Yetri dari Kemenkomarves, Deni Ridwan dari DJPPR, Andi Rusandi dari PRL-KKP dan Prof. Zuzy Anna dari Unpad, dengan dimoderatori oleh Lucky Adiyanto dari PKSPL-IPB. Hasil dari hari pertama adalah sebagai berikut:

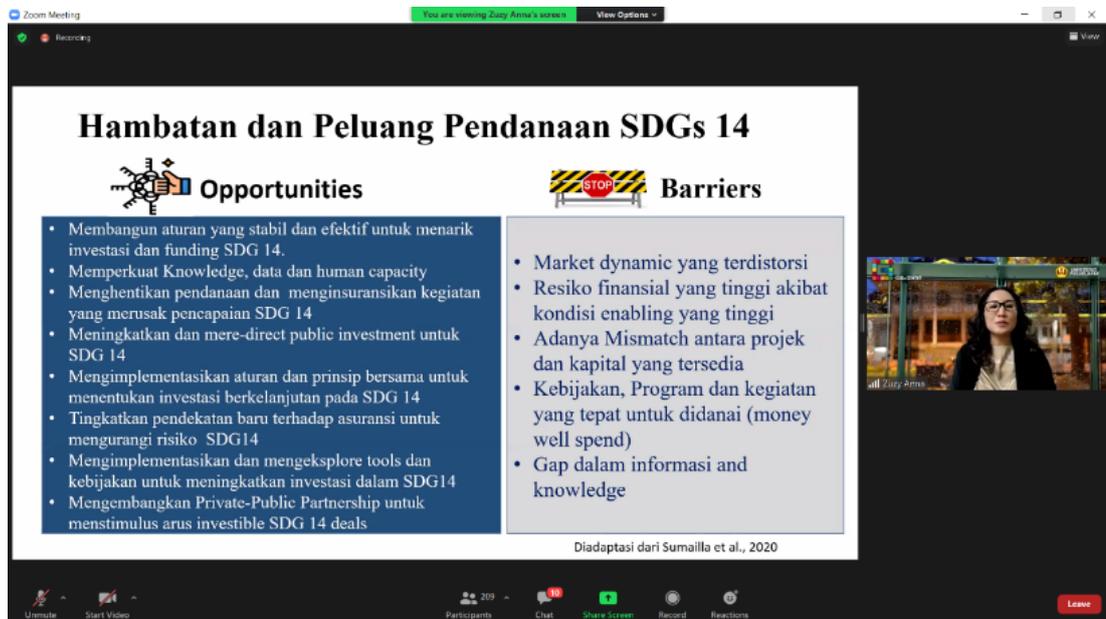
- Pencapaian target SDG 14 dilakukan dengan mendorong penyusunan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) sebagai indikator keberhasilan Goal 14
- Opsi sumber pendanaan SDGs antara lain: APBN, Sumber Pendanaan Non-pemerintah (filantropi, dana sosial, CSR), dan Sumber lainnya (PPP, Blended Finance)

- Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk menstimulus pengembangan energi baru terbarukan dan bidang usaha ramah lingkungan
- Melalui referensi dari jurnal Colin *et al.* 2006 dan data Kawasan Konservasi Perairan tahun 2010, biaya yang dibutuhkan untuk mengelola Kawasan Konservasi Perairan adalah sekitar US\$ 70,2 Juta/Ha/Tahun
- Estimasi kebutuhan sekitar US\$ 175 billion pertahun untuk mencapai target SDG 14 secara global di tahun 2030. Saat ini baru sekitar US\$ 25.5 billion
- Pemerintah sebagai leading role pendanaan SDG 14. Indonesia dapat invest minimal 10% dari output ekonomi laut untuk mengelola governance dan kesehatan laut
- Berbagai langkah startegis diatas perlu dipahami bersama agar kerangka yang ada dapat dikembangkan dan implementasikan dengan baik.

Pada hari kedua tema yang diangkat adalah *best practices and opportunity in the field*. Narasumber yang hadir pada hari kedua ini adalah Abdul Wahib Situmorang dari UNDP, Victor Nikijuluw dari CI Indonesia, Dani Setiawan dari KNTI, Nimmi Zulbainarni dari IPB, dan Prof. La Sara dari Dewan Pakar ISPIKANI. Hasil dari hari pertama adalah sebagai berikut:

- Dengan diterbitkannya SDG Government Securities Framework, saat ini terdapat pendanaan hijau, sosial dan biru. Ketiganya memiliki proxy yang berbeda
- Sampai dengan saat ini baru ada tiga negara yang telah menerbitkan blue bond: Seichelles (\$15 juta), Nordic-Baltic (\$213 juta), dan China (\$942 juta)
- Industri keuangan sebenarnya banyak yang ingin ikut berpartisipasi dalam pendanaan biru tetapi memiliki kesulitan untuk mendapat stock project pipelinenya
- Blue Abadi Fund (BAF) jika dilihat dari sumbernya sebenarnya adalah salah satu bentuk blended financing di tingkat lokal yang dikembangkan untuk membiayai kegiatan konservasi di Papua Barat
- *Lesson learned* dari BAF adalah perlunya persistent commitment, adanya task force, dan ketiga harus menentukan skala (MPA, seascape, province, country, region). Selain itu Cost modelling dan Cost forecasting sangat krusial di tingkat tapak
- Saat ini sumber pembiayaan masih sulit untuk diakses oleh masyarakat nelayan. Oleh karena itu diperlukan agenda-agenda perbaikan. Untuk lembaga keuangan diperlukan inovasi strategi pembiayaan yang lebih adaptif, pola pembiayaan yang lebih fleksibel dan murah, kemampuan untuk merespon perubahan, dan promosi serta sosialisasi informasi yang menjangkau luas hingga ke kampung-kampung nelayan. Di lain pihak, nelayan juga harus memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas usahanya sehingga membantu perbankan memahami karakteristik usaha yang dijalankan

- Strategi pembiayaan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan SDGs 14 antara lain: memobilisasi berbagai sumber; perbaikan institusi dan kebijakan dalam mengelola aliran pembiayaan; serta aliran pembiayaan harus dirancang dengan jelas, dikembangkan dan diimplementasikan dengan benar



Gambar 2.2 Pemaparan mengenai pendanaan SDG oleh Prof. Zuzi Anna

2.2 Undangan Pembahasan Hasil Analisis Data Survei Neraca SDAL Gili Matra

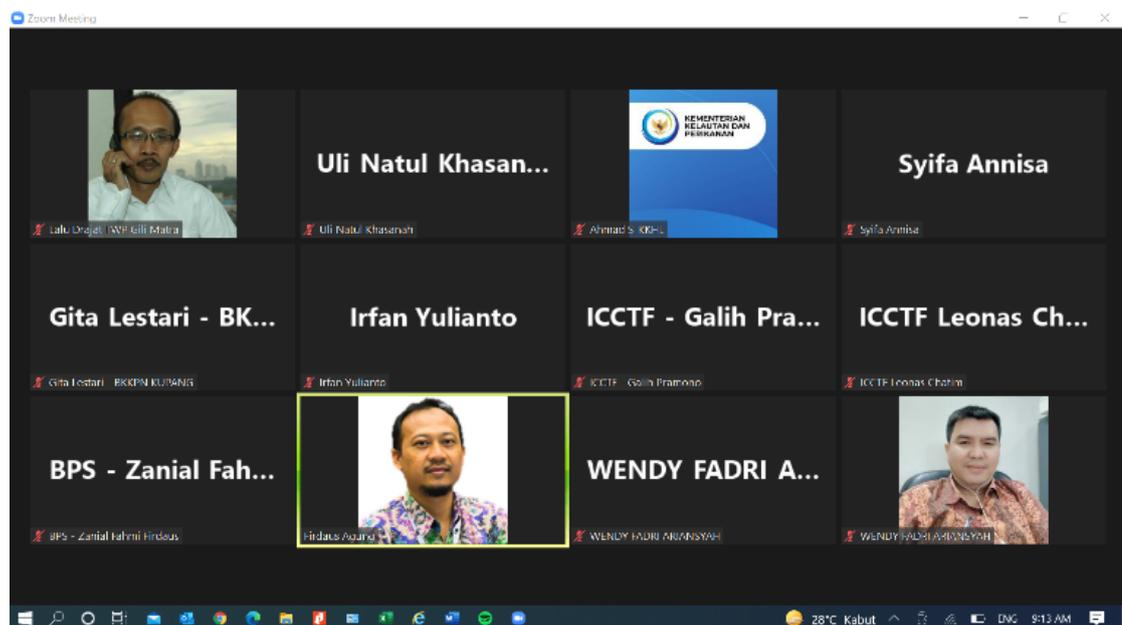
Pada tanggal 27-28 Oktober 2021 ICCTF menghadiri Undangan Pembahasan Hasil Analisis Data Survei Neraca SDAL Gili Matra melalui aplikasi zoom. Tujuan dari kegiatan ini adalah Mempresentasikan dan membahas hasil analisis data survei lapang neraca SDL TWP Gili Matra.

Kesimpulan dari kegiatan pada hari pertama ini adalah sebagai berikut:

- Perlu diskusi bersama untuk membahas pengumpulan data mengenai flow to economy
- Perlu duduk bersama agar dalam penyingkronan data tidak mengganggu deadline kegiatan
- Target minggu ini adalah menyelesaikan account 1, semua data dan analisisnya
- Target November full laporan telah selesai dan di bulan Desember awal dapat launching bersama dalam suatu kegiatan

Kemudian kesimpulan dan tindak lanjut berdasarkan pada hari kedua adalah sebagai berikut:

- Hasil index ocean account kemungkinan akan dapat didiskusikan pada akhir Desember
- Diagendakan segera mentabulasikan account 1, karena data sudah relative lengkap yang kemudian akan dinarasikan dengan target selesai minggu pertama November
- Terkait dengan pembahasan account 2 akan dilakukan diskusi lebih lanjut mengenai data yang digunakan yang akan diagendakan pada Hari Rabu, 3 November 2021 dengan target selesai minggu ke-2 / ke-3 November
- Terdapat kemajuan untuk account 3, untuk household nanti akan diinput dari data sekunder dari paper Sekito (2019) dan data dari Yayasan Rekam terkait dengan emisi udara dan data limbah cair dan target dapat selesai minggu ke-2
- Terkait emisi carbon, Yayasan rekam akan berusaha membantu untuk pengumpulan data lapangan lain seperti penggunaan LPG dan bahan bakar dari masing-masing jenis



Gambar 2.3 Diskusi pembahasan hasil analisis data survei neraca SDAL Gili Matra

2.3 Undangan Kick Off Meeting CPPR Bank Dunia

Pada tanggal 27 Oktober ICCTF menghadiri kegiatan Kick-off meeting dan pembagian kelompok kerja dalam rangka *Country Portfolio Performance Review (CPPR) 2021*.

Beberapa poin hasil diskusikan dari pertemuan ini antara lain:

- Akan dibentuk WG dan akan dimulai pada November
- K/L segera mendaftar WG dan berpartisipasi aktif dalam pembahasan
- Isu WG 1 terkait regulasi dan mekanisme pengusulan menjadi krusial untuk dibahas agar dapat mempercepat project. Banyak regulasi yang mengatur pinjaman terkait tupoksi lembaga yang terpisah sehingga perlu diidentifikasi masing-masing K/L yang berpotensi memperlambat proses pelaksanaan project
- Isu masing-masing WG saling terkait maka apabila dimungkinkan perwakilan K/L dapat berpartisipasi pada beberapa WG
- Terkait keterbatasan staf, perlu pengaturan waktu pembahasan WG agar beberapa K/L dapat berpartisipasi dalam semua WG yang krusial

PEMBAGIAN WORKING GROUP			
No	Kelompok Kerja	Isu yang akan Dibahas	
1	Meningkatkan regulasi dan harmonisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kebutuhan revisi regulasi untuk mengakomodasi pinjaman berbasis hasil dan dukungan untuk pemulihan bencana • Peningkatan pemahaman instrumen pembiayaan • Proses restrukturisasi atau amandemen • Sinkronisasi AWP dan alokasi DIPA 	Bappenas
2	Meningkatkan perencanaan dan persiapan proyek serta implementasi Kerangka Kerja Sosial dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan <i>lending pipeline</i> dan harmonisasi dengan <i>Blue Book/ Green Book</i> • Pembentukan PMU/PIU • Pemanfaatan <i>Project Preparation Facility (PPF) loan</i> • Peningkatan desain dan kesiapan proyek • PPSD dan <i>advance procurement</i> • Implementasi kerangka kerja sosial dan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kerja Sama Pendanaan Multilateral, Bappenas • Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Bappenas
3	Meningkatkan kinerja proyek sedang berjalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan/<i>procurement</i> • Revisi DIPA • Dana ineligible • Kapasitas Pemerintah Daerah • Isu BAST • Isu lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Bappenas • Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Kemenkeu

Gambar 2.4 Penjelasan pembagian working group



Gambar 2.5 Penjelasan Pelaksanaan CPPR

2.4 Undangan Rapat Pembahasan RAN TPB/SDGs 2020-2024

Pada tanggal 11 November 2021, dilaksanakan rapat Pembahasan RAN TPB/SDGs 2020-2024 secara daring melalui aplikasi zoom. Agenda pertemuan ini antara lain: Penyampaian draft RAN TPB/SDGs 14 (Bab 2 dan 3); konfirmasi, masukan, dan diskusi terkait Draft RAN TPB/SDGs 14; dan pembahasan isu-isu terkait lainnya.



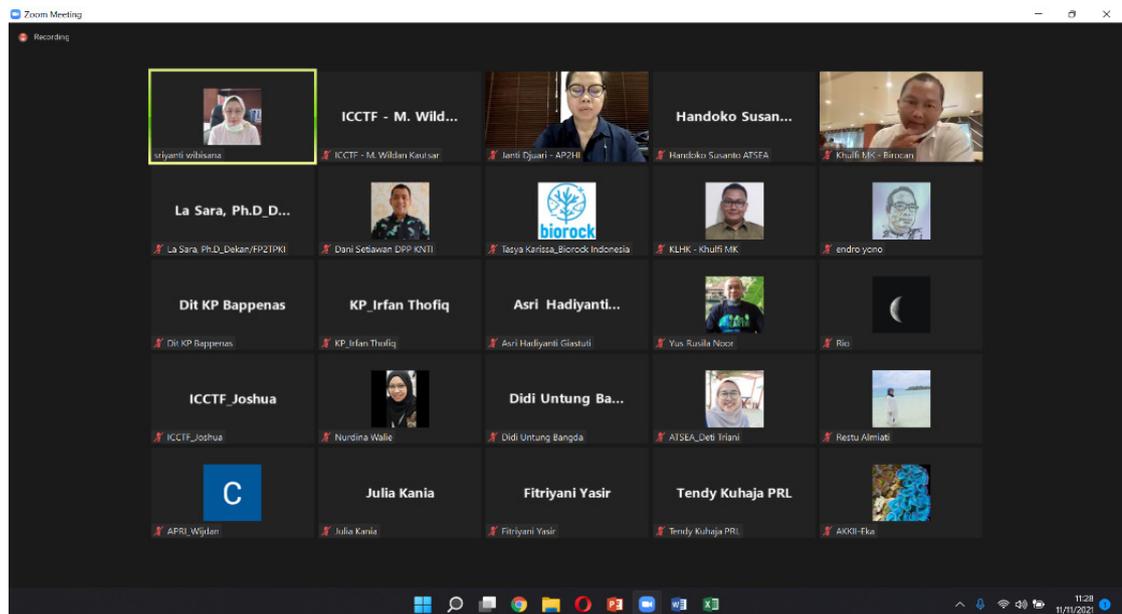
Gambar 2.6 Paparan Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas

Dalam sambutannya, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan paparan sebagai berikut:

- Berbeda dengan periode sebelumnya, RAN TPB/SDGs 2020-2024 mengidentifikasi intervensi sampai dengan level rincian output (RO)
- Sistematika RAN TPB/SDGs 14 disusun oleh sekretariat SDGs untuk Bab 1, 4, dan 5. Sementara Bab 2 dan 3 disusun oleh Lembaga-lembaga dimana matriksnya akan dibagikan untuk mendapatkan masukan
- Terdapat 3 target yang diarusutamakan dalam RPJMN tahun 2020-2024 yaitu 14.4, 14.5, dan 14.1
- Arah kebijakan utama pembangunan Tujuan 14 difokuskan pada: (1) peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan; dan (2) Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan pelaku usaha perikanan kelautan
- Masukan untuk matriks indikator kegiatan diharapkan dapat diselesaikan pada hari Jumat, 12 November 2021

Selanjutnya berdasarkan hasil diskusi, dirangkum beberapa catatan masukan sebagai berikut:

- Artisanal fisheries banyak yang belum clear di Indonesia
- Target terkait nelayan bisa dielaborasi lebih besar, tidak hanya masalah asuransi
- Terkait kartu Kusuka, terdapat persoalan bagaimana menumbuhkan kelembagaan ekonomi mikro pada nelayan Indonesia. BUMKAM sudah ada namun masyarakat tidak mengerti mekanismenya, harus ditumbuhkan mekanisme adaptif
- Program Tol Laut dapat digunakan sebagai sarana menghidupkan ekonomi mikro masyarakat nelayan
- Perlu komitmen dan kepatuhan terhadap pendanaan. Diharapkan terdapat solusi untuk meregister kapal kecil supaya tidak lagi IUU dan pendataan menjadi lebih baik
- Tata kelola yang mengatur akses BBM perlu ditingkatkan. Kemudian muara-muara tempat nelayan kecil bersandar agar dapat diperbaiki



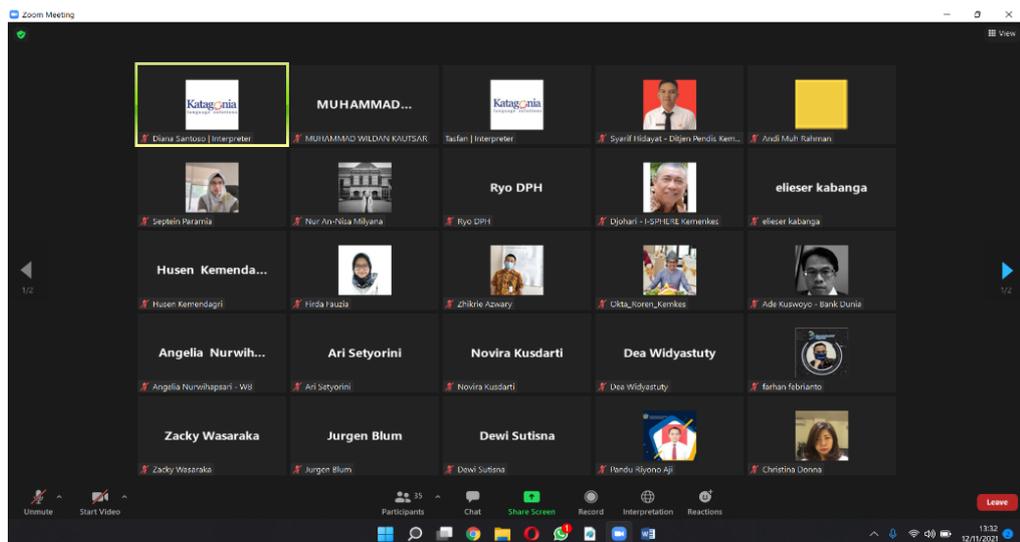
Gambar 2.7 Diskusi pembahasan draft RAN TPB oleh peserta rapat

2.5 Undangan Kelompok Kerja Peningkatan Regulasi dan Harmonisasi Sistem Pemerintah dan Bank Dunia

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 12 November 2021. Agenda dari pertemuan ini adalah *Working Group Discussion* Kelompok Kerja 1 CPPR 2021 dengan tema Peningkatan Regulasi dan Harmonisasi Sistem Pemerintah dan Bank Dunia.

Pembahasan dalam pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

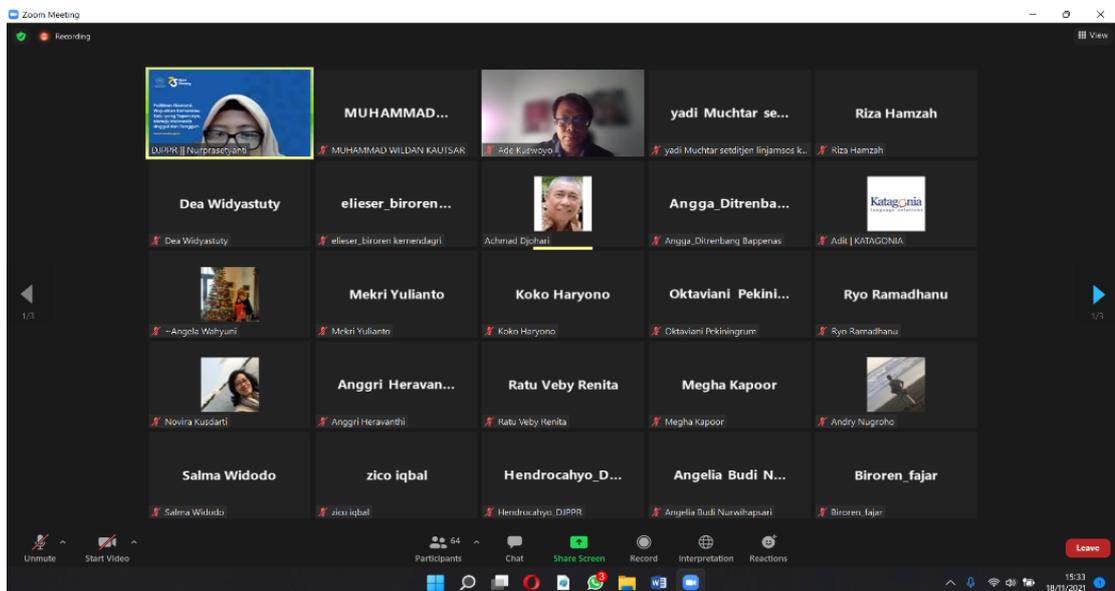
- Pemerintah Indonesia memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional, dimana salah satu pemberi pinjamannya adalah Bank Dunia
- Berdasarkan Laporan Kinerja Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri, pada saat ini terdapat 21 proyek pinjaman Bank Dunia yang sedang berjalan dengan total USD 3,7 miliar. Jumlah ini belum termasuk pinjaman tunai (program loan) seperti *Development Policy Loan*, *Program for Result (PforR)* dan *IPF with PBCs*
- Bappenas dan Kementerian Keuangan melaksanakan monev terhadap pelaksanaan proyek pinjaman secara rutin setiap triwulan. Forum ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kinerja pengelolaan pinjaman luar negeri kedepannya.
- Selain forum monev secara triwulanan, Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia akan melaksanakan *Country Portfolio Performance Review (CPPR)*. CPPR merupakan forum tahunan bersama untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan proyek yang sedang berjalan, meningkatkan kualitas perencanaan dan persiapan proyek, serta membahas isu-isu lain yang relevan dan membutuhkan langkah tindak lanjut bersama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.



Gambar 2.8 Diskusi pada Working Group Discussion Kelompok Kerja 1

Pertemuan dilanjutkan pada tanggal 18 November 2021. Agenda pertemuan kedua ini masih sama dan melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya terhadap isu-isu yang belum sempat dibahas karena keterbatasan waktu. Pada pertemuan ini beberapa poin utama yang dapat dirangkum antara lain:

- Sistem *Program for Result* (PforR) masih sangat baru penerapannya di Indonesia dan belum semua peraturan di dalamnya memiliki landasan aturan yang mendukung pelaksanaannya
- Sebagian besar K/L menggunakan sistem yang IPF. Kementerian Keuangan dalam waktu dekat juga akan melakukan revisi terhadap IPF karena ada beberapa program pipeline yang akan segera efektif.
- Amandemen atau restrukturisasi dimungkinkan tetapi terdapat rambu-rambu yang harus diperhatikan dan proses yang harus dilalui.
- Beberapa kementerian memerlukan support dari Bank Dunia dalam melaksanakan amandemen dan restrukturisasi. Jika memungkinkan perlu dilakukan peningkatan kapasitas. Bank Dunia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian-Kementerian yang membutuhkan dukungan.
- Mengenai isu penyesuaian aktivitas terkait covid-19 yang belum sempat dibahas. Sebagai percontohan dapat diambil lesson learned dari project yang telah dilaksanakan di Kementerian Agama



Gambar 2.9 Diskusi lanjutan pada Working Group
Discussion Kelompok Kerja 1

2.6 Undangan CPPR Meeting Working Group III: Implementasi – Meningkatkan Kinerja Proyek Bank Dunia yang Sedang Berjalan

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 29 November 2021. Agenda dari pertemuan ini adalah *Working Group Discussion* Kelompok Kerja 1 CPPR 2021 dengan tema Meningkatkan Kinerja Proyek Bank Dunia yang Sedang Berjalan. Hasil diskusi dari pertemuan ini, antara lain:

1. monev sudah disampaikan setiap bulan secara rutin, namun terpenting adalah action plan terhadap permasalahan yang terjadi pada saat project implementation sehingga memberikan solusi dan tidak terus-menerus mengalami kondisi permasalahan yang sama
2. standar harmonisasi peraturan pengadaan yang mengakomodasi permintaan dari Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia
3. perbedaan peraturan baru Bank Dunia dan Perpres Pengadaan Pemerintah yang sudah dilakukan pembaruan sejak tahun 2014 di mana antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia harus saling mensepakati Bersama, namun tidak boleh mengganggu deliverity output
4. Proses pengadaan di Bank Dunia menggunakan aplikasi STEP sedangkan LKPP menggunakan SPSE
5. Contoh proyek Bank Dunia yang terkendala terkait proses pengadaan adalah proyek yang memiliki paket *National Competitive Bidding* yang membolehkan mengimplementasikan Perpres namun harus digarisbawahi persyaratan lain yang mandatory dari Bank Dunia, biasanya proyek oleh Pemda yang beda persepsi/ pemahaman
6. proses pengadaan pada peraturan yang baru oleh Perpres belum diupdate untuk peraturan Bank Dunia sehingga menjadi permasalahan karena perbedaan pemahaman
7. Penyederhanaan proses NOL dari Bank Dunia khususnya untuk proyek-proyek Kementerian PUPR, namun menurut Bank Dunia sebenarnya sudah ada SOP tersendiri terkait hal tersebut yang terdiri 3 tahap dan prosesnya maksimal 7 hari
8. Permasalahan gagal lelang yang berulang bagaimana solusinya dan kejelasan SOP berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaiannya, apakah dibutuhkan penunjukan langsung atau bagaimana
9. AWP tidak sinkron dengan anggaran DIPA di mana anggaran DIPA nilainya lebih kecil dari AWP sehingga project susah bergerak

2.7 Undangan Loknas KKHL “Konservasi Efektif untuk Ruang Laut Lestari”

Pada tanggal 3 Desember 2021, ICCTF menghadiri undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan Lokakarya Nasional KKHL dengan judul “Konservasi Efektif untuk Ruang Laut Lestari secara online melalui aplikasi zoom.

Berikut adalah poin-poin hasil dari pertemuan ini:

- Neraca SDAL selaras dengan PP 48 2017 tentang instrument ekonomi lingkungan hidup. Neraca sdal sangat relevan dengan pengelolaan ruang laut.
- Akan disusun dokumen wisata premium berbasis konservasi oleh Dit. KKHL-KKP
- Gili matra dipilih sebagai pilot project karena Kawasan konservasi Gili Matra merupakan Kawasan konservasi nasional, merupakan salah satu destinasi pariwisata utama, terletak di lesser sunda yang merupakan salah satu laut prioritas CTI-CFF dan pemanfaatan kawasan berdampak terhadap penurunan kondisi lingkungan. Gili Matra merupakan lokasi yang strategis.
- Estimasi nilai ekonomi sumberdaya dilakukan melalui identifikasi jasa lingkungan yang disediakan oleh sumber daya dan valuasi nilai ekonomi dari masing-masing jasa lingkungan yang disediakan
- Penyusunan neraca memerlukan data yang time series untuk melihat perkembangannya dan modeling untuk ke depan.
- Ocean account sebagai langkah awal enabling factor, berawal dari neraca sumber daya jelautan untuk pemetaan dan perencanaan sumber daya kelautan guna menggambarkan valuasi ekonomi sumber daya kelautan, debottlenecking kompleksitas kelembagaan dan keterlibatan stakeholders.



Gambar 2.10 Penyampaian Materi oleh Narasumber dalam Lokakarya Nasional KKHL

2.8 Undangan Pertemuan 3rd ATSEA-2 Regional Steering Committee Meeting

Pada tanggal 7 Desember 2021, ICCTF menghadiri undangan pertemuan *3rd ATSEA-2 Regional Steering Committee Meeting* bertempat di Hotel Royal Padjadjaran Bogor. Agenda pertemuan ini adalah membahas *Proposed AWP and Budget 2022* dan *Summary of Regional Assessments*. Ada pun tindak lanjut dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- 15 Desember: *Summary* dari *meeting decisions* dan *draft proceedings* akan didistribusikan kepada seluruh member RSC
- 22 Desember: *due date* untuk *comments, revisions, dan concurrence* oleh member RSC
- 28 Desember: *approved proceedings* akan diseminasi kepada member RSC dan diunggah kedalam website ATSEA-2

2.9 Undangan Rapat Koordinasi Pokja RAN Konservasi Mamalia Laut ke-3

Pada tanggal 7 Desember 2021, ICCTF menghadiri undangan Rapat Koordinasi Pokja RAN Konservasi Mamalia Laut ke-3 secara online melalui aplikasi zoom. Dalam pertemuan ini, KKHL memfasilitasi dan memonitoring kendala dan progress dari pelaksanaan RAN yang sudah diamanahkan pada Kepmen No.79 tahun 2018. Terdapat 5 pokja penanggung jawab tema, yaitu: Penanggung jawab terkait kebijakan di KKLH; Pokja penyadartahuan oleh Dit. Penanganan Pelanggaran; Pokja mitigasi dampak perikanan oleh Dit. KAPI; Pokja Data dan informasi di Kepala Pusat Statistik dan Informasi; dan Pokja peningkatan SDM di Pusrisikan, BRSDM KP. Berikut adalah kesimpulan dari pertemuan ini:

- Diperlukan peningkatan peran serta Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan swasta
- Mengoptimalkan peran penanggung jawab tiap tema
- Diperlukan sinkronisasi dan kelengkapan regulasi mamalia dengan K/L terkait
- Mendorong ditetapkannya Kepmen KP tentang pedoman penanganan dan pelepasan mamalia laut dari alat penangkapan ikan
- Menyusun SOP Struktur data dan spesifikasi produk data serta perencanaan riset terintegrasi
- Matriks capaian RAN mamalia laut dilengkapi paling lambat 14 Desember 2021



Gambar 2.11 Pembahasan progres RAN Konservasi Mamalia Laut

2.10 Marine Tourism Meeting

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2021. Project ini nantinya akan menjadi topik utama dalam penulisan beberapa riset ilmiah, namun fokus utama adalah MPA bukan *tourism*-nya. Baru kemudian bagaimana MPA bisa dimanfaatkan menjadi *marine tourism* (ekonomi, social). Project ini diharapkan dapat menjadi jawaban overtourism saat ini di Bali dengan cara menggabungkan potensi 3 provinsi sehingga wisatawan lebih merata dan MPA terjaga dengan baik.



Gambar 2.12 Pembahasan marine tourism

2.11 Undangan Penutupan Global Marine Commodities (GMC)

Pada tanggal 27 Desember 2021, ICCTF menghadiri undangan kegiatan penutupan Global Marine Commodities (GMC) yang diselenggarakan secara online melalui aplikasi zoom. Proyek hibah GMC ini diimplementasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan dari Badan Pembangunan PBB (UNDP) dan pendanaan dari GEF.



Gambar 2.13 Sambutan Menteri PPN/Kepala Bappenas

Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, menyampaikan bahwa blue economy bisa dijasikan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pemulihan biru atau blue recovery usai pandemi Covid-19. Deputy Resident Representative UNDP Indonesia juga menyatakan bahwa kegiatan dalam GMC telah meningkatkan kesadaran tentang pengadaan makanan laut yang berkelanjutan dan menguatkan dialog multi-pemangku kepentingan untuk mempromosikan kebijakan manajemen perikanan berkelanjutan dan mencapai SDG 14. Penutupan proyek juga ditandai dengan *live cooking* dan dialog interaktif.



Gambar 2.14 Live Cooking bersama Direktur KP Bappenas dan Senior Adviser UNDP Indonesia

3 | Komunikasi, Outreach dan Kemitraan

Berbagai kegiatan komunikasi dan publikasi yang terkait dengan penanggulangan perubahan iklim bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai dampak perubahan iklim, sekaligus mensosialisasikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Bappenas pada satker ICCTF dalam melaksanakan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Pada tahun 2020 hingga di tahun 2021 ini, kegiatan komunikasi dan publikasi ICCTF juga diarahkan untuk mendukung implementasi Bappenas dalam konteks RPJMN serta monitoring ekosistem pesisir prioritas dan Rehabilitasi Terumbu Karang.

Kegiatan komunikasi ICCTF terbagi atas dua strategi yaitu komunikasi internal dan eksternal. Melalui kegiatan-kegiatan komunikasi ini, eksistensi ICCTF sebagai satu-satunya lembaga perwalian dana perubahan iklim yang dimandatkan oleh pemerintah di Indonesia diharapkan dapat lebih dikenal dan diakui, baik oleh pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri. Komunikasi internal kepada seluruh staf ICCTF di semua level untuk meningkatkan manajemen pengetahuan seluruh staf tentang visi-misi ICCTF, menginternalisasi nilai-nilai strategis organisasi, dan membangun solidaritas staf agar terbangun suatu budaya kerja positif di ICCTF.

Sedangkan untuk kegiatan komunikasi eksternal, ICCTF menekankan pada pengenalan visi-misi organisasi, peranan strategis organisasi, serta eksistensi dan fungsi dari pengembangan program - program ICCTF. Selain itu juga menyebarluaskan capaian serta pembelajaran program-program ICCTF yang layak untuk disebarluaskan dan direplikasi di daerah lainnya yang memiliki karakteristik dan permasalahan serupa. Upaya pengenalan dan penjangkauan publik ICCTF dilakukan secara intens dengan pola yang beragam dan target yang variatif. Pola komunikasi yang diterapkan secara umum tidak hanya dalam bentuk sosialisasi dan ekspose program - program ICCTF, tetapi juga dalam bentuk kunjungan ke lokasi program, pameran dan seminar, optimalisasi sosial media dan website ICCTF, serta peningkatan relasi dengan media melalui kegiatan *press conference*. Komunikasi lebih fokus pada komunikasi eksternal melalui penyelenggaraan kegiatan *kick-off*, seminar publik, serta pelatihan.

3.1 Media Sosial

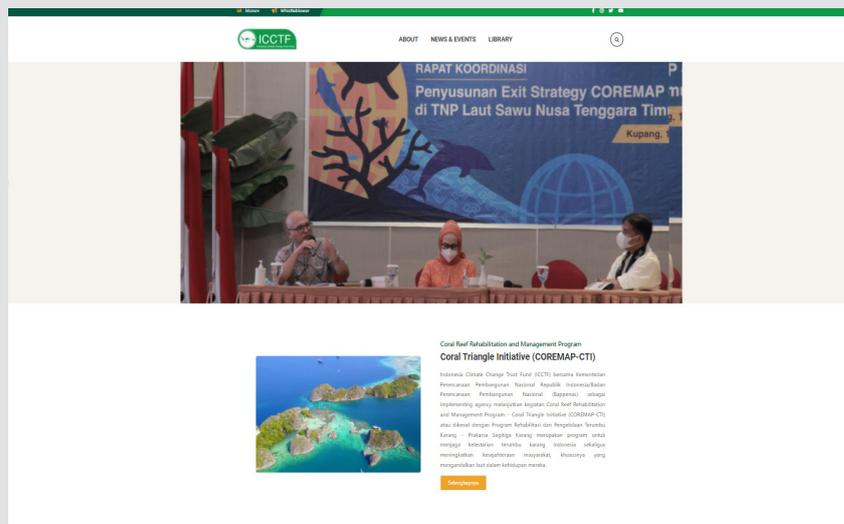
Pada triwulan keempat 2021 ini ICCTF melakukan strategi pendekatan komunikasi digital karena dinilai lebih interaktif dan *real time*, melalui pengelolaan media sosial ICCTF yang terdiri atas Facebook (<https://www.facebook.com/IndonesiaClimateChangeTrustFund>); Twitter (@ICCTF_ID); Instagram (@icctfofficial); Youtube (ICCTF Official) dan website ICCTF (<https://www.icctf.or.id/>). ICCTF berupaya untuk selalu mengoptimalkan kanal informasi yang tersedia termasuk media sosial dengan memperbaharui penyebaran konten informasi dan foto - foto kegiatan terkini yang dilakukan oleh ICCTF dan para mitra pelaksana di daerah. Portofolio pengelolaan media sosial ICCTF pada periode triwulan keempat terangkum pada Gambar dan Tabel di bawah. Adapun laporan *traffic* dari media sosial yang dikelola oleh ICCTF terangkum dalam infografis berikut.



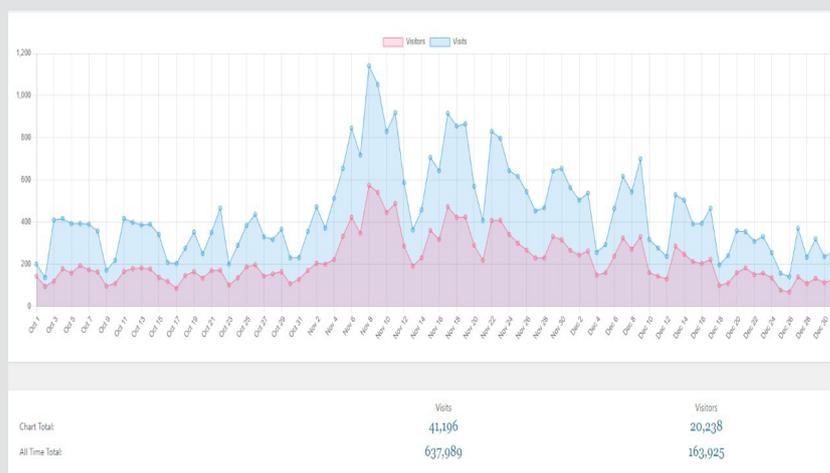
Gambar 3.1.1 Infografis Perkembangan Akun Sosial Media ICCTF: Facebook, Twitter dan Instagram pada kuartal 4 (Bulan Oktober, November dan Desember) Tahun 2021.



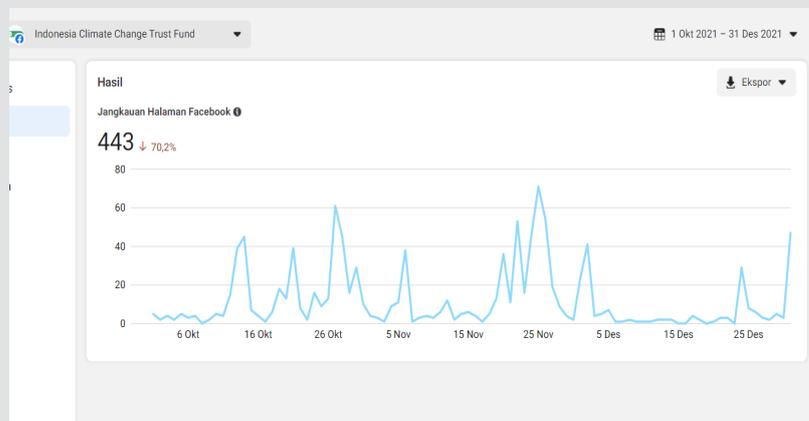
Gambar 3.1.2 Pop-up Ucapan Selamat Hari Natal & Tahun Baru 2022 di Website ICCTF pada Kuartal 4 (Bulan Desember) Tahun 2021.



Gambar 3.1.3 Homepage Website ICCTF pada Kuartal 4 (Bulan Desember) Tahun 2021.



Gambar 3.1.4 Hasil Jangkauan Visit & Visitor Website ICCTF kuartal 4 (Bulan Oktober, November dan Desember) Tahun 2021.



Gambar 3.1.5 Hasil Jangkauan Halaman Facebook Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 4 (Oktober, November dan Desember) Tahun 2021.

Pemirsa

Pemirsa Saat Ini

Pemirsa Potensial

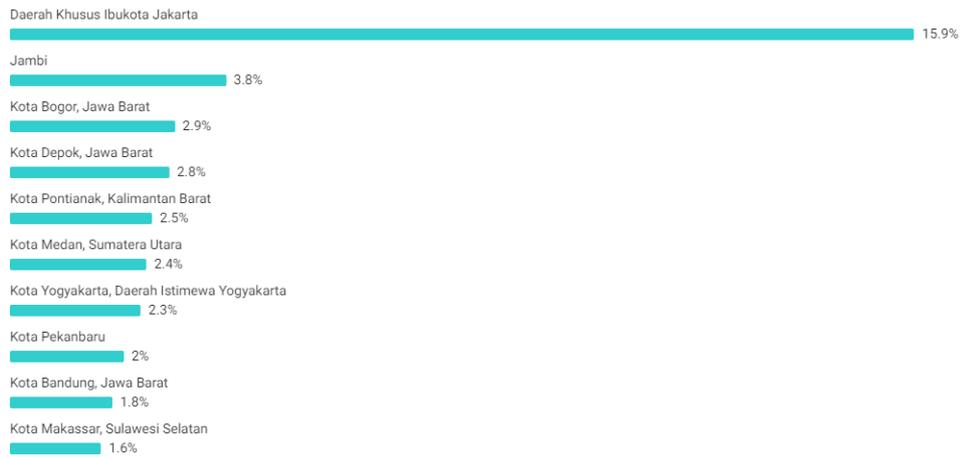
Suka Halaman Facebook

994

Usia & Jenis Kelamin



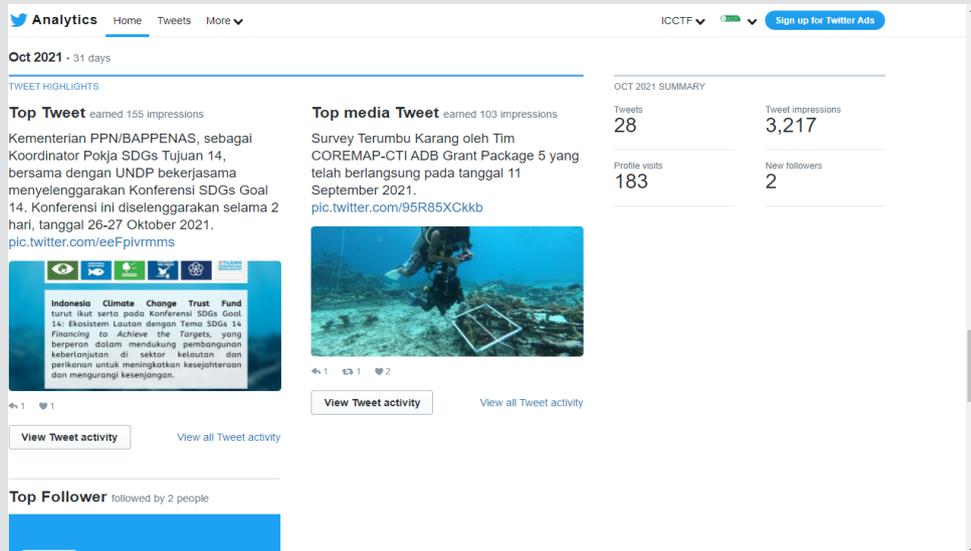
Kota Populer



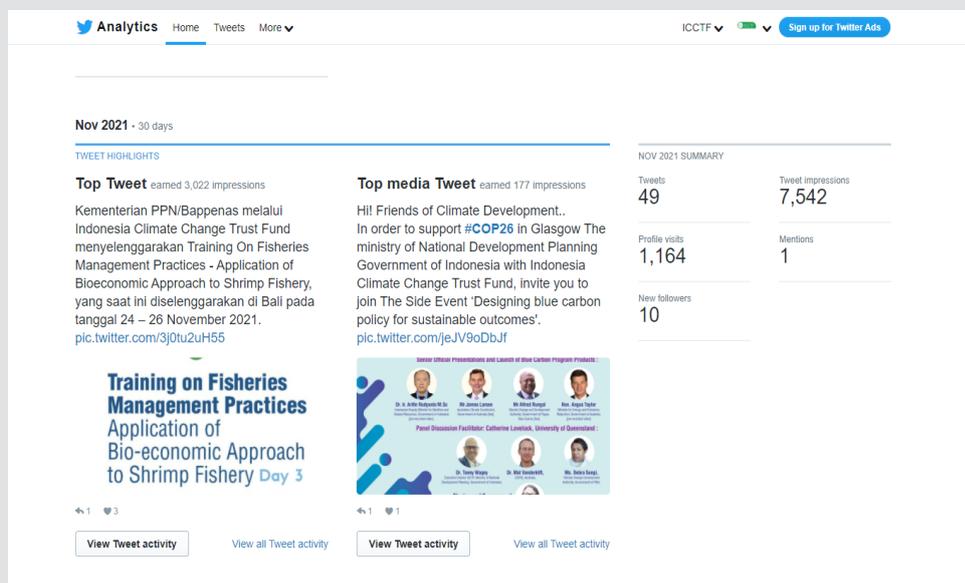
Negara Populer



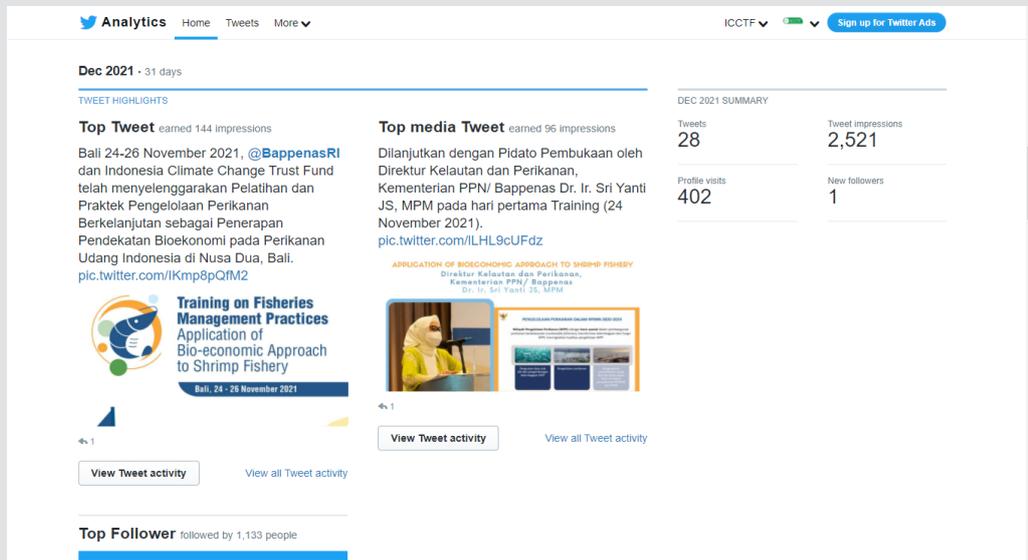
Gambar 3.1.6 Hasil Jangkauan Pemirsa Suka Halaman Facebook Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 4 (Oktober, November dan Desember) Tahun 2021.



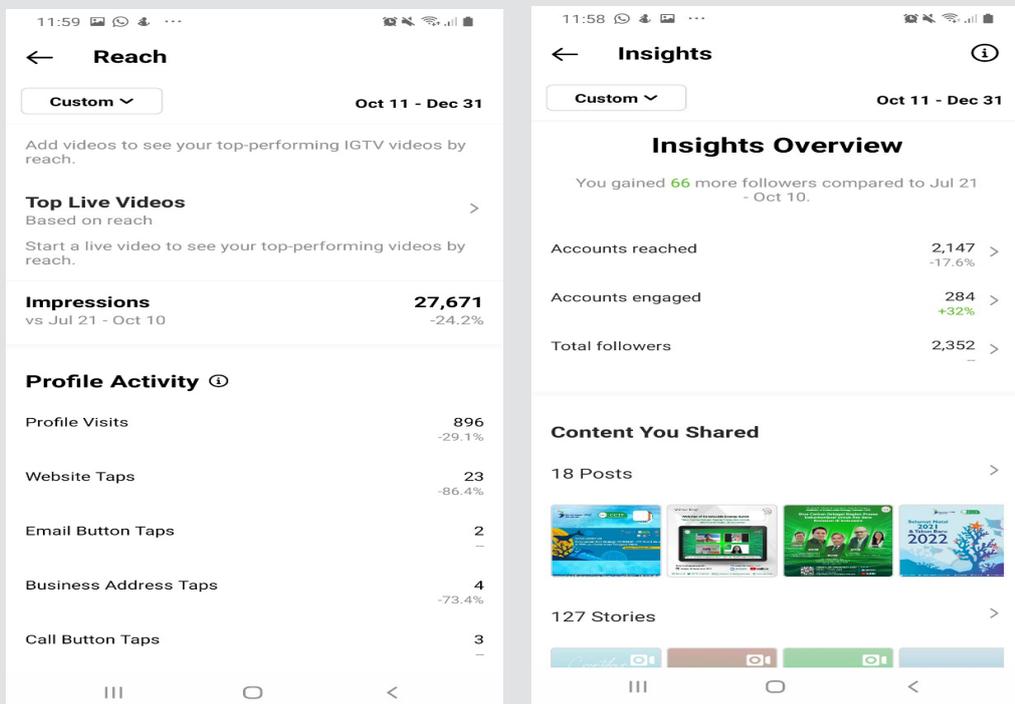
Gambar 3.1.7 Hasil Jangkauan Halaman Twitter Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 4 (Bulan Oktober) Tahun 2021.



Gambar 3.1.8 Hasil Jangkauan Halaman Twitter Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 4 (Bulan November) Tahun 2021.

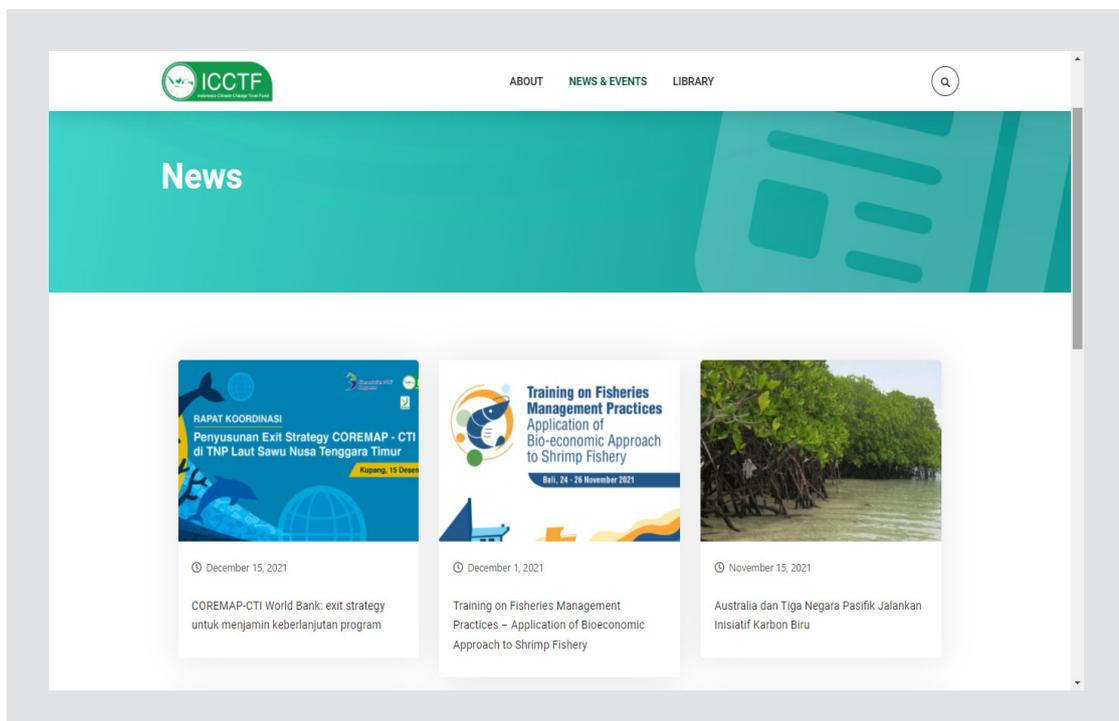


Gambar 3.1.9 Hasil Jangkauan Halaman Twitter Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 4 (Bulan Desember) Tahun 2021.



Gambar 3.1.10 Hasil Jangkauan Halaman Instagram Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 4 (Oktober, November dan Desember) Tahun 2021.

Pengelolaan website, *traffic* merekam sekitar 41.196 kali jumlah kunjungan ke halaman website ICCTF dengan 20.238 total pengunjung dari awal bulan Oktober hingga periode akhir Desember 2021. Pada triwulan keempat 2021 ini, tim komunikasi juga memperbarui tampilan website ICCTF dengan pembaruan layout pada halaman utama. Beberapa laman dalam website ICCTF pembaruan foto kegiatan, *homepage ICCTF*, *Pop-up Information*, *Publication*, *Event*, *Gallery Photo & Video*, dan tentunya *News*. Beberapa judul artikel yang tayang di ICCTF *News* periode Oktober - Desember 2021, di antaranya dapat terlihat pada Gambar 3.1.11 ; 3.1.12 dan juga Tabel 3.1.1 dibawah ini.



Gambar 3.1.11 Tampilan Page News dan Artikel pada Website Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 4 (Bulan November dan Desember) Tahun 2021.



🕒 December 23, 2021

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan



🕒 December 20, 2021

Coremap-CTI World Bank, Exit Strategy Untuk Menjamin Keberlanjutan Program



🕒 December 19, 2021

Masyarakat Adat Rote Ndao Dapat Pendampingan Kelola Potensi Laut



🕒 December 18, 2021

Yayasan Terangi Dampingi Masyarakat Sumba Barat Daya Jaga Perairan Sawu



🕒 December 17, 2021

Melihat Pusat Informasi Ekowisata TNP Laut Sawu di Pantai Oesina



🕒 December 17, 2021

ICCTF Ajak Masyarakat NTT Rawat Kawasan Konservasi Laut Sawu



🕒 December 16, 2021

Sektor Kelautan dan Perikanan Jadi Tumpuan Masyarakat Indonesia Timur



🕒 December 16, 2021

COREMAP-CTI World Bank Kawal Pemberdayaan Laut Sawu



🕒 December 15, 2021

Bappenas sebut TNP laut sawu penyumbang terbesar kawasan konservasi

Gambar 3.1.12 Tampilan News dan Artikel yang tayang di Website Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 4 (Bulan Desember) Tahun 2021.

Tabel 3.1.1 Daftar Judul Artikel yang telah tayang di ICCTF News pada Kuartal 4 di bulan November dan Desember 2021.

NO	TANGGAL	JUDUL ARTIKEL
1.	4 November 2021	Apa Itu COP26 dan Mengapa Penting?
2.	4 November 2021	COP 26: Janji Pemimpin Dunia Melawan Perubahan Iklim.
3.	15 November 2021	Australia dan Tiga Negara Pasifik Jalankan Inisiatif Karbon Biru.
4.	1 Desember 2021	Training on Fisheries Management Practices – Application of Bioeconomic Approach to Shrimp Fishery.
5.	15 Desember 2021	COREMAP-CTI World Bank: exit strategy untuk menjamin keberlanjutan program.
6.	15 Desember 2021	Bappenas sebut TNP laut sawu penyumbang terbesar kawasan konservasi.
7.	16 Desember 2021	COREMAP-CTI World Bank Kawal Pemberdayaan Laut Sawu.
8.	16 Desember 2021	Sektor Kelautan dan Perikanan Jadi Tumpuan Masyarakat Indonesia Timur.
9.	17 Desember 2021	ICCTF Ajak Masyarakat NTT Rawat Kawasan Konservasi Laut Sawu.
10.	17 Desember 2021	Melihat Pusat Informasi Ekowisata TNP Laut Sawu di Pantai Oesina.
11.	18 Desember 2021	Yayasan Terangi Dampingi Masyarakat Sumba Barat Daya Jaga Perairan Sawu.
12.	19 Desember 2021	Masyarakat Adat Rote Ndao Dapat Pendampingan Kelola Potensi Laut.
13.	20 Desember 2021	Coremap-CTI World Bank, Exit Strategy Untuk Menjamin Keberlanjutan Program.
14.	23 Desember 2021	Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

3.2 Produksi Media Publikasi

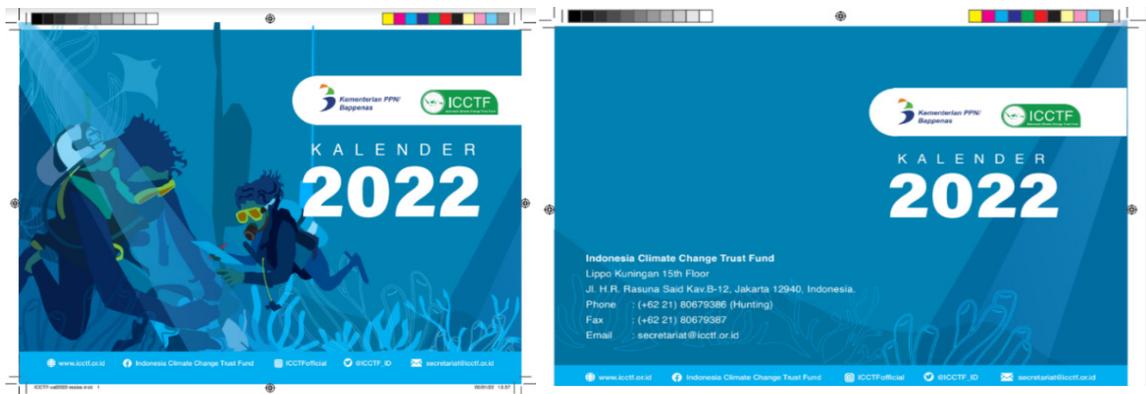
Pada Kuartal 4 ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan komunikasi massa secara digital. ICCTF dan mitra pelaksana COREMAP–CTI melakukan produksi media baik secara digital dalam bentuk cetak, visual, serta audio. Produksi media secara digital untuk mendukung kegiatan sekretariat termasuk dengan menyelesaikan layout dan publikasi Newsletter Triwulan 3, *Design Sosial Media Content* Kuartal 4 Tahun 2021 yang dapat dilihat pada gambar 3.2.1, 3.2.2 dan juga Kalender Tahun 2022 pada gambar 3.2.3.



Gambar 3.2.1 Tampilan Produksi Newsletter Kuartal 3 pada Tahun 2021.

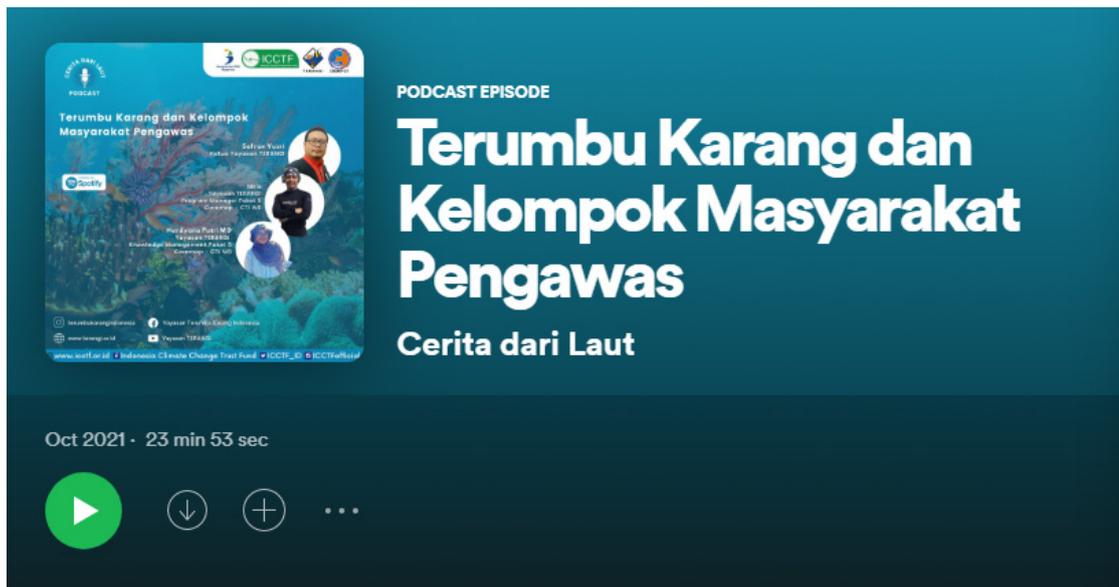


Gambar 3.2.2 Tampilan Desain Layout dan Publikasi Sosial Media Content Kuartal 4 (Bulan Oktober, November dan Desember) Tahun 2021.



Gambar 3.2.3 Tampilan Produksi Kalender Tahun 2022.

Produksi media digital tidak hanya media cetak tetapi secara audio ada berupa Podcast yang juga dilakukan untuk mendukung kegiatan kampanye program COREMAP-CTI, produksi podcast ini bekerja sama dengan mitra pelaksana COREMAP-CTI World Bank. Pada kuartal 4 terdapat Podcast Cerita Dari Laut, Episode 8 yang berjudul “Terumbu Karang dan Kelompok Masyarakat Pengawas” yang dapat didengarkan pada Spotify.



Gambar 3.2.4 Podcast Cerita Dari Laut Episode 8 “Terumbu Karang dan Kelompok Masyarakat Pengawas”

3.3 Media Monitoring

Pada Kuartal 4 ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan Media Monitoring terhadap kegiatan yang melibatkan media massa baik cetak maupun online. Pada Desember 2021 ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan Media Monitoring terhadap kegiatan yang melibatkan media massa di antaranya *Exit Strategy* COREMAP-CTI World Bank di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada bulan Desember 2021.



Gambar 3.3.1 Press Conference Exit Strategy COREMAP–CTI World Bank untuk menjamin keberlanjutan program oleh Eksekutif Direktur ICCTF bersama dengan Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/ Bappenas

Kupang, 15 Desember 2021 – *Coral Reef Rehabilitation and Management Program* (COREMAP) merupakan salah satu upaya nyata dari Pemerintah Indonesia untuk menjaga kelestarian sumberdaya terumbu karang, ekosistem terkait, dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. COREMAP merupakan proyek jangka panjang yang didesain dalam tiga tahapan yaitu COREMAP Tahap I (1998-2004), COREMAP Tahap II (2004-2011), dan *Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative* (COREMAP-CTI) yang merupakan tahap ketiga dari rancangan tersebut.

Berdasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024, terdapat program prioritas yang menjadi dasar pelaksanaan COREMAP-CTI berupa Program Prioritas 1 Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman dan Program Prioritas 6 Perikanan dan Kelautan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup. “Bappenas menyiapkan kondisi sebagai enabler untuk membangun wadah partisipatif lintas sector serta membuat Model Inovasi Pembangunan yang Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi dan Kelestarian Ekosistem melalui implementasi program COREMAP CTI” ujar Sri Yanti JS, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas pada Sambutan Rapat Koordinasi Exit Strategi COREMAP CTI World Bank Di TNP Laut Sawu Nusa Tenggara Timur (15/12/2021).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam COREMAP-CTI oleh Kementerian PPN/ Bappenas melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) meliputi penguatan kelompok masyarakat pengawas di target Kawasan Konservasi; implementasi rencana aksi Pengelolaan Zona Pesisir Terpadu; implementasi rencana aksi nasional untuk jenis prioritas di target Kawasan Konservasi; pembangunan infrastruktur pendukung untuk integrasi elemen ekowisata pada lokasi; pembangunan kapasitas pemangku kepentingan baik pada badan pengelola maupun masyarakat; serta pembangunan skema pendanaan berkelanjutan.

Kegiatan COREMAP-CTI World Bank (WB) ini dilakukan di dua provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat. Di Nusa Tenggara Timur pelaksanaan COREMAP-CTI World Bank diimplementasikan melalui kerja sama dengan 4 mitra pelaksana yaitu Yayasan Terangi, YAPEKA, PILI dan Yayasan Reef Check Indonesia (YRCI). Dari 10 Kabupaten yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Perairan Laut Sawu, 6 kabupaten mendapatkan intervensi dari kegiatan COREMAP- CTI WB.

Tahun 2021 ini adalah tahun kedua dalam pelaksanaan kegiatan dan merupakan tahun yang penting dalam implementasi kegiatan. Ada banyak capaian yang sudah dihasilkan oleh para mitra pelaksana di tahun ini antara lain: (i) pembangunan infrastruktur penunjang Ekowisata, (ii) instalasi PLTS untuk mendukung kegiatan perikanan masyarakat, (iii) kajian investasi bisnis ekowisata, (iv) pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengawasan berbasis masyarakat, (v) kajian mitigas

bycatch hiu, (vi) kajian populasi dan pergerakan cetacean, (vii) peningkatan kapasitas staff daerah dan masyarakat, (viii) pengembangan ekowisata berbasis species, serta (ix) dukungan akses pengelolaan sumber daya pesisir kepada kelompok masyarakat hukum adat.

Diakhir sambutannya Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Sri Yanti, menyampaikan “Implementasi di lapangan ini akan berakhir pada bulan Maret 2022, untuk itu perlu adanya jaminan dan perhatian terkait dengan proses transfer aset, transfer knowledge dan keberlanjutan kegiatan yang memerlukan pendampingan setelah project selesai dan harus melibatkan banyak pihak”.

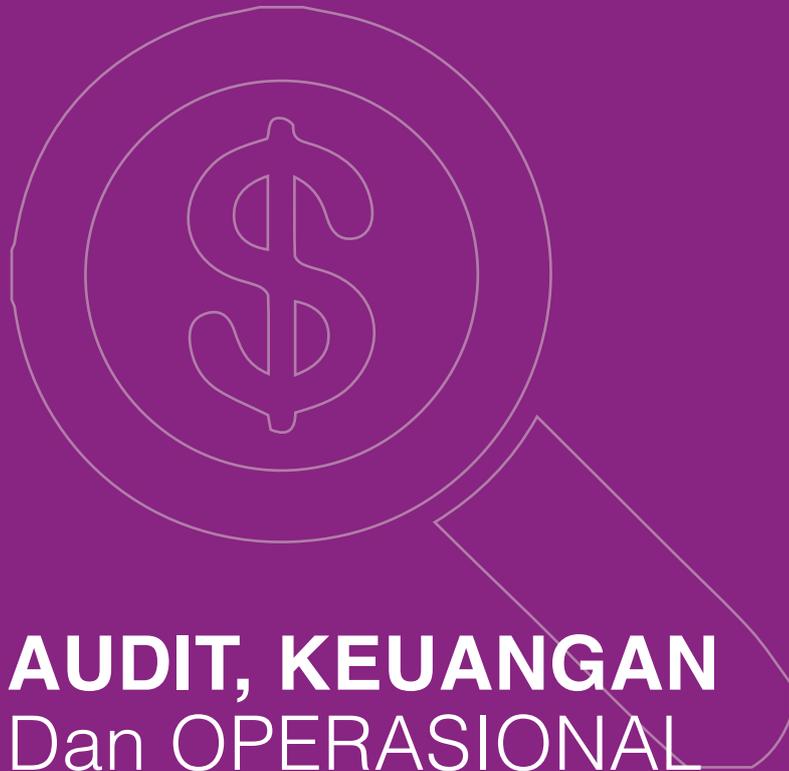
Hal ini semua akan dituangkan kedalam suatu exit strategi yang tidak hanya disusun oleh para mitra pelaksana namun juga mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan terkait. Untuk implementasi exit strategi ini diperlukan adanya komitmen diantara pemangku kepentingan dan kelompok terkait untuk memelihara dan menjaga sarana dan prasarana yang ada serta melakukan pendampingan dan meneruskan program yang sudah dilaksanakan agar tetap bermanfaat dan berkelanjutan.

Tabel 3.3.1 Daftar Unggahan Publikasi Media Pada Kegiatan Exit Strategi COREMAP-CTI World Bank di Kupang, Nusa Tenggara Timur Desember 2021.

No	Nama Media	Judul Berita	Link	Tgl Terbit
1.	Indonesia Mandiri	COREMAP-CTI World Bank Kawal Pemberdayaan Laut Sawu.	https://www.indonesiamandiri.web.id/2021/12/coremap-cti-world-bank-kawal.html	15 Desember 2021
2.	INews Surabaya.id	Sektor Kelautan dan Perikanan Jadi Tumpuan Masyarakat Indonesia Timur.	https://surabaya.inews.id/read/23180/sektor-kelautan-dan-perikanan-jadi-tumpuan-masyarakat-indonesia-timur	15 Desember 2021
3.	RRI.co.id	Coremap-CTI World Bank, Exit Strategy Untuk Menjamin Keberlanjutan Program.	https://rri.co.id/kupang/daerah/1293670/coremap-cti-world-bank-exit-strategy-untuk-menjamin-keberlanjutan-program	15 Desember 2021
4.	Media Indonesia	Bappenas Targetkan Kawasan Konservasi Perairan Capai 26,9 Ha.	https://m.mediaindonesia.com/humaniora/458020/bappenas-targetkan-kawasan-konservasi-perairan-capai-269-juta-ha	15 Desember 2021

5.	Antara News.com	Bappenas sebut TNP laut sawu penyumbang terbesar kawasan konservasi.	https://www.antaraneews.com/berita/2587317/bappenas-sebut-tnp-laut-sawu-penyumbang-terbesar-kawasan-konservasi#:~:text=Bappenas%20sebut%20TNP%20laut%20sawu%20penyumbang%20terbesar%20kawasa-n%20konservasi,-Rabu%2C%2015%20Desember&text=Luas%20TNP%20Laut%20Sawu%20saat.jumlah%20TNP%20lainnya%20di%20Indonesia	15 Desember 2021
6.	Victory News.id	Laut Sawu NTT, Taman Nasional Perairan Paling Luas Dengan Ragam Hayati.	https://victorynews.id/cover/laut-sawu-ntt-taman-nasional-perairan-paling-luas-dengan-ragam-hayati/	15 Desember 2021
7.	Victori News Cetak	Lawu Sawu Harus Dijaga karena Berdampak Ekonomi.		16 Desember 2021
8.	Timor Express	Bappenas Gelar Rapat Koordinasi di Kupang.		16 Desember 2021

9.	Kompas.com	26,9 Juta Hektar Perairan Indonesia Akan Dikonservasi, Sebagian Besar di NTT.	https://regional.kompas.com/read/2021/12/16/095904378/269-juta-hektar-perairan-indonesia-akan-dikonservasi-sebagian-besar-di-ntt	16 Desember 2021
10.	Sindonews.com	Melihat Pusat Informasi Ekowisata TNP Laut Sawu di Pantai Oesina	https://photo.sindonews.com/view/22819/melihat-pusat-informasi-ekowisata-tnp-laut-sawu-di-pantai-oesina	16 Desember 2021
11.	Surabaya INews.id	Pantai Oesina Kini Punya Pusat Informasi, Ada Kerangka Paus Pilotnya	https://surabaya.inews.id/read/23560/pantai-oesina-kini-punya-pusat-informasi-ada-kerangka-paus-pilotnya	16 Desember 2021
12.	Antara.com	Program CTI World Bank di NTT dan Papua Barat diharapkan harus berkelanjutan	https://kupang.antaranews.com/berita/70869/program-cti-world-bank-di-ntt-dan-papua-barat-diharapkan-harus-berkelanjutan	16 Desember 2021
13.	Indonesia Mandiri	ICCTF Ajak Masyarakat NTT Rawat Kawasan Konservasi Laut Sawu	https://www.indonesiamandiri.web.id/2021/12/icctf-ajak-masyarakat-ntt-rawat-kawasan.html	16 Desember 2021
14.	Indonesia Mandiri	Yayasan Terangi Dampingi Masyarakat Sumba Barat Daya Jaga Perairan Sawu	https://www.indonesiamandiri.web.id/2021/12/yayasan-terangi-dampingi-masyarakat.html	17 Desember 2021
15.	Indonesia Mandiri	Masyarakat Adat Rote Ndao Dapat Pendampingan Kelola Potensi Laut	https://www.indonesiamandiri.web.id/2021/12/masyarakat-adat-rote-ndao-dapat.html	19 Desember 2021
16.	Sindonews.com	Melihat Pusat Informasi Ekowisata TNP Laut Sawu di Pantai Oesina	https://photo.sindonews.com/view/22819/melihat-pusat-informasi-ekowisata-tnp-laut-sawu-di-pantai-oesina	16 Desember 2021



3

AUDIT, KEUANGAN
Dan OPERASIONAL

1. Laporan Audit Tahun 2021

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menganut prinsip transparansi dan akuntabel, Laporan Keuangan ICCTF setiap tahunnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Negara. Pada tahun 2021 ini BPK sudah mengaudit Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas di mana di dalamnya terdapat juga Laporan Keuangan Konsolidasi Satuan Kerja Majelis Wali Amanat ICCTF Tahun Anggaran 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian juga hasil audit untuk Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh BPK Khusus untuk Hibah COREMAP *World Bank* dan *Asian Development Bank* dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan audit untuk kegiatan di Tahun Anggaran 2021 akan diaudit oleh BPK mulai awal tahun 2022, baik kegiatan yang sumber dananya dari APBN Rupiah Murni maupun Hibah Luar Negeri. Khusus untuk Hibah, permintaan audit khusus BPK oleh pemberi hibah (donor).

2. Informasi Keuangan Periode Oktober-Desember 2021

elaksanaan program dan kegiatan ICCTF mendapatkan dukungan yang berasal dari rupiah murni APBN serta pendanaan hibah luar negeri dari *World Bank* dan ADB. Total anggaran DIPA yang dikelola oleh ICCTF per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 76,57 miliar terdiri dari APBN sebesar Rp 6,39 miliar dan hibah *World Bank* sebesar Rp 51,01 miliar dan hibah *Asian Development Bank* sebesar Rp 19,17 miliar. Penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2021 dituangkan pada tabel di bawah ini.

Tabel Rincian Penyerapan Dana sampai dengan bulan Desember tahun 2021

Sub Komponen	Kegiatan	Alokasi Anggaran 2021	Total Penyerapan s.d Desember 2021		Sisa Anggaran
KOMPONEN-643	DUKUNGAN PENDAMPINGAN DAN OPERASIONAL KEGIATAN PHLN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.392.015.000	6.340.320.759	99%	51.694.241
Sub Komponen 643-A	Pendampingan Kegiatan Proyek Hibah	1.425.986.000	1.410.222.743	99%	15.763.257
Sub Komponen 643-B	Penggalangan Dana (<i>Fundraising</i>) & Komunikasi	896.105.000	892.783.722	99%	3.321.278
Sub Komponen 643-C	Pelaksanaan Dukungan Kegiatan Operasional ICCTF	4.069.924.000	4.037.314.294	99%	32.609.709
KOMPONEN-644	KOORDINASI KEGIATAN HIBAH COREMAP-CTI	70.187.789.000	69.771.410.048	99%	416.378.952
Sub Komponen 644-A	Hibah COREMAP-CTI Worldbank	51.017.789.000	50.732.256.635	99%	285.532.365
Sub Komponen 644-B	Hibah COREMAP-CTI Asian Development Bank	19.170.000.000	19.039.153.413	99%	130.846.587
TOTAL		76.579.804.000	76.111.730.807	99%	468.073.193

3. Operasional / Kesekretariatan

Sampai pada Triwulan 4, jumlah tenaga professional yang mendukung kegiatan ICCTF berjumlah 26 Orang yang terdiri dari 14 konsultan dengan penugasan time base, 2 konsultan output base, 1 konsultan intermittent dan 10 tenaga jasa lainnya. Penyebaran gender terdiri dari 18 jenis kelamin laki-laki dan 9 jenis kelamin perempuan sebagai berikut:

No	Nama	Posisi	Pendanaan
1	Gabriel A. Wagey	Executive Director	Rupiah Murni (APBN)
2	Mega Gusti Rama	Finance and Operation Manager	Rupiah Murni (APBN)
3	Anggri Heravanthi	Accounting Specialist	Rupiah Murni (APBN)
4	SiwiHandinah	General Adm dan HR Coordinator	Rupiah Murni (APBN)
6	Muhammad Wildan Kautsar	Knowledge Management Officer	Rupiah Murni (APBN)
7	Joshua Arianto M	Program Officer	Rupiah Murni (APBN)
8	Affalia Maydi Hatika	Communication Assistant	Rupiah Murni (APBN)
10	Deta Kurnia Soundra	IT Officer	Rupiah Murni (APBN)
11	Eko Wahyudi	Finance and Administration Officer COREMAP-CTI WB	Rupiah Murni (APBN)
12	Uli Natul Khasanah	Adminstration Officer	Rupiah Murni (APBN)
13	Agus Salim	Logistic and General Support	Rupiah Murni (APBN)
14	Sugihartono	Office Assistant	Rupiah Murni (APBN)
15	Muhamad Nuryanto	Pengemudi	Rupiah Murni (APBN)
16	Nur Jali	Procurement Officer	Rupiah Murni (APBN)
17	Andrian Firmansyah	Tenaga Operasional Perkantoran	Rupiah Murni (APBN)
18	Februanty Suyatiningsih	Monev Specialist COREMAP CTI WB	Hibah LN World Bank
21	Alya Prima Syanti	Financial Management Specialist COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
22	Leonas Chatim	Project Team Leader COREMAP-CTI ADB	Hibah LN ADB
23	Nia Kania	Administration Officer COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
24	Dimas Darmawan	Procurement Specialist COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
25	Galih Purnomo	Monev Specialist COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
26	Derick Prawira	Creative Officer COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB

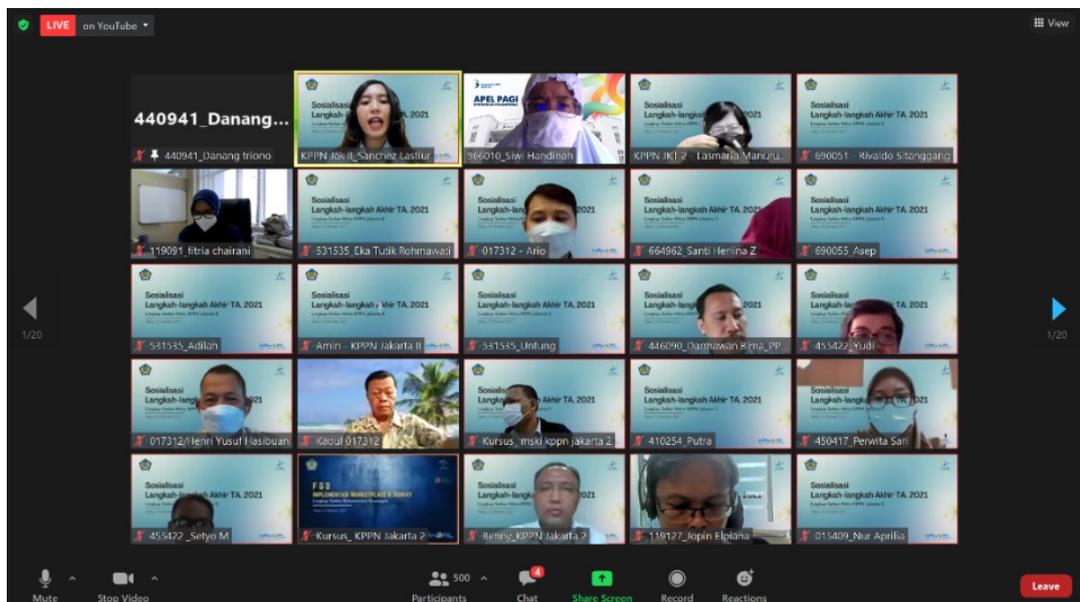
Kegiatan-kegiatan Sekretariat ICCTF yang dilaksanakan sepanjang triwulan 4 yaitu:

1. **Bimbingan Teknis Pelaksanaan SPSE Versi 4.4 & Persiapan Dokumen Rencana Usulan Pengadaan Barang & Jasa TA 2022**

Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2021 melalui Zoom Conference.

2. **Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2021 Satker Mitra KPPN Jakarta II**

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2021. Rapat diadakan oleh Kementerian Keuangan. Rapat diadakan setiap akhir tahun anggaran dan setelah diterbitkannya pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor.PER-9/PB/2021 tentang pedoman pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021 kepada Seluruh Satuan kerja mitra KPPN Jakarta II melalui Surat KPPN Jakarta II Nomor: S-1406/WPB.12/KP.02/2021 tanggal 12 Oktober 2021. Tujuan diadakan adalah untuk menyamakan persepsi atas pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran.



3. Workshop Procurement Coremap-CTI ADB

Kegiatan ini dilaksanakan pada 13 Oktober 2021.

4. Rapat Penelaahan usul revisi anggaran

Kegiatan ini membahas pembukaan blokir, pemenuhan kekurangan refocusing tahap IV dan penambahan hibah luar negeri Kementerian PPN/Bappenas TA 2021, dilaksanakan pada tanggal 14-15 Oktober 2021.

5. Penelaahan RKA-K/L

Kegiatan ini untuk menelaah Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 Kementerian PPN/ Bappenas 25 Oktober 2021.

Recording

Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2022 (1/2)

↳ Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2022

Rp Miliar

Program	RM	RMP	Pinjaman	Hibah	Jumlah
Perencanaan Pembangunan Nasional	635,30	3,02	56,46	51,82	746,60
Dukungan Manajemen	629,29	-	-	-	629,29
Jumlah	1.264,59	3,02	56,46	51,82	1.375,89

Rincian:

- Belanja Operasional Rp 392,95 miliar
- Bel. Non Operasional Rp 982.94 miliar

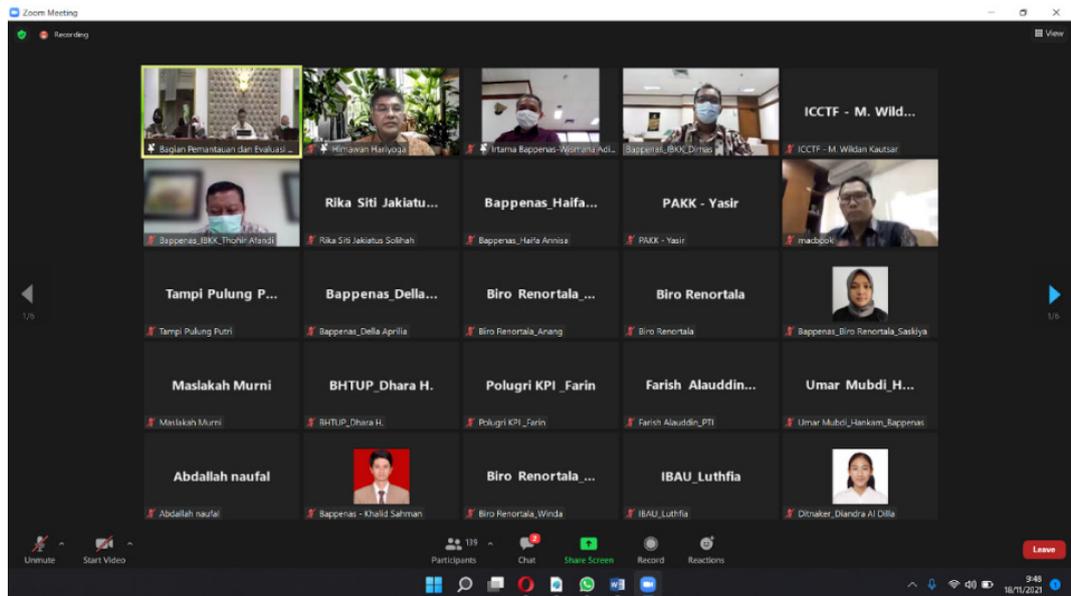
Your network bandwidth is low

Bappenas-Kahmal

3

6. Rapat Koordinasi

Kegiatan ini untuk mengkoordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 dan Pendampingan Pengisian e-Performance di Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan tanggal 18-19 November 2021



7. Annual Evaluation

Kegiatan ini dilakukan untuk evaluasi kegiatan ICCTF selama tahun 2021 dan Penyusunan Laporan Tahunan Satuan Kerja MWA ICCTF tahun anggaran 2021, yang dilaksanakan tanggal 21 Desember 2021, di Hotel Fairmont Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan menyusun laporan tahunan Satker ICCTF tahun anggaran 2021.

LAPORAN
TRIWULAN **4**

